

No. 155 Desember 2018 - Januari 2019

# BaKTI**News**

www.bakti.or.id

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA



- MASYARAKAT TERLIBAT, HASIL BELAJAR MURID MENINGKAT
- SAORAJA AMPL AWARD 2018 SULAWESI SELATAN
- AMBULANS UNTUK WARGA DESA
- PELAMINAN BUKAN TEMPAT BERMAIN ANAK

TIDAK DIPERJUALBELIKAN  
NOT FOR SALE

ISSN 1979-777X



9 771979 777057



# BaKTI**News**

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA

ISSN 1979-777X

[www.bakti.or.id](http://www.bakti.or.id)

Editor **M. YUSRAN LAITUPA**  
**ZUSANNA GOSAL**  
**VICTORIA NGANTUNG**  
**ITA MASITA IBNU**

Events at BaKTI **SHERLY HEUMASSE**

Smart Practices  
& Info Book **SUMARNI ARIANTO**

Database  
Kontak **INDINA ISBACH**

Design & layout  
Editor Foto **FRANS GOSALI**

## Redaksi

**Jl. H.A. Mappanyukki No. 32 Makassar 90125, Sulawesi Selatan - Indonesia Telp. +62 411 832228, 833383 Fax +62 411 852146**

**Email [info@bakti.or.id](mailto:info@bakti.or.id) atau [baktinews@bakti.or.id](mailto:baktinews@bakti.or.id) SMS BaKTI**News** 0813 4063 4999, 0815 4323 1888, 0878 4000 0201**

**Facebook [www.facebook.com/yayasanbakti](http://www.facebook.com/yayasanbakti) Twitter @InfoBaKTI**

BaKTI**News** adalah media pertukaran pengetahuan tentang pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. Tujuan BaKTI**News** adalah mempromosikan praktik cerdas pembangunan dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia agar dapat diketahui oleh khalayak luas dan menginspirasi pelaku pembangunan di berbagai daerah dalam upaya menjawab berbagai tantangan pembangunan. BaKTI**News** terbit setiap bulan dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris, untuk memudahkan pembaca dalam mendapatkan informasi pembangunan dari Kawasan Timur Indonesia.

BaKTI**News** disirkulasi melalui pos kepada pembaca dengan target utama adalah para pelaku pembangunan yang berdomisili di daerah kepulauan dan daerah terpencil. Tidak dikenakan biaya apapun untuk berlangganan BaKTI**News** agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi pembangunan melalui majalah ini. Selain dalam bentuk cetak, BaKTI**News** juga dapat diakses di website BaKTI: [www.bakti.or.id](http://www.bakti.or.id) dan dikirimkan melalui email kepada pelanggan yang dapat mengakses internet.

BaKTI**News** dikelola oleh Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI). Seluruh artikel BaKTI**News** adalah kontribusi sukarela para pelaku pembangunan dari berbagai kalangan dan daerah yang ingin berbagi pengetahuan dengan khalayak luas.

BaKTI**News** is a knowledge exchange media platform for development issues in eastern Indonesia. BaKTI**News** aims to promote development smart practices from different regions in eastern Indonesia so that the practices become known to a wider audience and inspire development stakeholders in other regions in their efforts to answer development challenges. BaKTI**News** is published monthly in two languages, Indonesian and English, to facilitate readers who don't understand Indonesian to gain a better understanding of development in eastern Indonesia.

BaKTI**News** is sent by post to readers and the main target is development stakeholders living in isolated regions and island regions. BaKTI**News** is provided free of charge so the development community can access relevant development information easily. BaKTI**News** is also provided in an electronic version that can be accessed on [www.bakti.or.id](http://www.bakti.or.id) and can be sent electronically to subscribers with internet access.

BaKTI**News** is managed by the Eastern Indonesia Knowledge Exchange (BaKTI). All articles are contributed voluntarily by development stakeholders from different areas in eastern Indonesia who wish to share their information with a wider audience.

## BERKONTRIBUSI UNTUK BaKTI**News**

BaKTI**News** menerima artikel tentang kemajuan pembangunan, pembelajaran dari suatu kegiatan, praktik cerdas pembangunan, hasil-hasil penelitian yang dapat diaplikasikan, dan teknologi tepat guna dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua).

Panjang artikel adalah 1.000 - 1100 kata, menggunakan Bahasa Indonesia maupun Inggris, ditulis dengan gaya populer. Foto-foto penunjang artikel sangat dibutuhkan. Tim editor BaKTI**News** akan melakukan edit terhadap setiap artikel yang akan dimuat untuk kesesuaian tempat dan gaya bahasa. Redaksi BaKTI**News** tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat.

BaKTI**News** accepts articles about development programs, lessons learnt from an activity, development smart practices, research results that can be applied, and applied technology from different stakeholders and regions in eastern Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, and Papua). Articles should be 1,000-1,100 words, in either Indonesian or English, and written in a popular style.

Articles should also be sent with photos that illustrate the article. The editors of BaKTI**News** will edit every article for reasons of space and style. BaKTI**News** does not provide payment to writers for articles.

## MENJADI PELANGGAN BaKTI**News** Subscribing to BaKTI**News**

Untuk berlangganan BaKTI**News**, silahkan mengirimkan data diri anda (organisasi, posisi, nomor HP, alamat email) lengkap dengan alamat lengkap yang disertai dengan kode pos melalui email [baktinews@bakti.or.id](mailto:baktinews@bakti.or.id).

Bagi yang berdomisili di Makassar, Anda dapat mengambil BaKTI**News** di Display Corner Gedung BaKTI pada setiap hari kerja.

To subscribe to BaKTI**News** please send us your full contacts details (including organization, position, HP number and email address) with full postal address to [baktinews@bakti.or.id](mailto:baktinews@bakti.or.id).

For those living in Makassar, please stop by the BaKTI office and pick up your copy from the display corner from Monday to Friday.

# Daftar Isi

BaKTI News

Desember 2018 - Januari 2019

No. 155

- 1** Pelatihan Kompetensi Analisis Kebijakan untuk ASN dan Non-ASN Sulawesi Selatan  
Oleh **RIO AFIFUDDIN**
- 5** Saoraja AMPL Award 2018 Sulawesi Selatan Memberi Apresiasi, Menguatkan Advokasi  
Oleh **YUDI WIJANARKO dan HAMSAH SINRING**
- 9** Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Pemuda di Kawasan Timur Indonesia : Adakah Potensi yang Bisa Diraih ?  
Oleh **ATHIA YUMNA**
- 13** Pastor Vesto dan Perjuangannya untuk Orang Asmat (Bagian 1)  
Oleh **PETRUS SUPARDI**
- 17** Pelaminan Bukan Tempat Bermain Anak.  
Oleh **M. GHUFRAN H. KORDI K.**
- 21** Masyarakat Terlibat, Hasil Belajar Murid Meningkatkan  
Oleh **SETIAWAN CAHYO NUGROHO, HERA DIANI dan SHARON KANTHY**
- 27** Sekber Kabupaten Bersiap Menghadapi Situasi Krisis  
Oleh **SYAIFULLAH, RAHMAN RAMLAN, dan DESY MUTIALIM**
- 31** Ambulans untuk Warga Desa  
Oleh **BAIQ TITIS YULIANTY**
- 36** Leboni, Elegi Pembangunan di Jantung Sulawesi  
Oleh **M. YUSUF WEANDARA**
- 40** Update Batukarinfo
- 41** Info Buku

■ Foto Cover : Fauzan Ijazah/KIAT Guru



Petugas kesehatan dari Puskesmas Sabutung, Kabupaten Pangkep bersiap menuju Pulau Bahagia dengan menggunakan Perahu Sehat, untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terluar kabupaten Pangkep.

Foto: Yusuf Ahmad/Yayasan BaKTI

# Pelatihan Kompetensi Analisis Kebijakan untuk ASN dan Non-ASN Sulawesi Selatan

Oleh **RIO AFIFUDDIN**



**S**emangat awal pentingnya Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan (JFAK) menjadi kebutuhan bagi setiap instansi pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah untuk mempersiapkan aparatur yang berkompoten untuk menjadi Analisis Kebijakan (AK) yang profesional di instansi masing-masing. Seorang analis kebijakan didefinisikan sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mempunyai tugas, tanggung jawab, serta wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan di instansi pusat dan daerah.

Melalui kajian dan analisis yang dilakukan seorang analis kebijakan diharapkan mampu menganalisa dan merumuskan kebijakan yang dapat menyelesaikan masalah-masalah terkait kebijakan publik daerah yang menyangkut kebijakan pelayanan dasar publik, pelayanan umum daerah, dan kebijakan terkait langsung dengan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dan instansi masing-masing.

Melihat perkembangan saat ini dengan semakin kompleksnya permasalahan dalam kebijakan publik, kebutuhan terhadap kompetensi Analisis Kebijakan tidak hanya

dibutuhkan oleh ASN di sektor publik. Oleh sebab itu, untuk memperkuat eksistensi Analisis Kebijakan sebagai sebuah profesi, Lembaga Administrasi Negara (LAN) selaku instansi pembina Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan (JFAK) sedang melakukan penyusunan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang dapat digunakan sebagai mekanisme sertifikasi profesi Analisis Kebijakan.

Dalam upaya mendukung proses ke arah sertifikasi profesi Analisis Kebijakan, LAN bekerjasama dengan Knowledge Sector Initiative (KSI) untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan profesi Analisis Kebijakan, yang kemudian berkolaborasi dengan BaKTI untuk menyelenggarakan Pelatihan Kompetensi Analisis Kebijakan. Melalui pelatihan ini para peserta akan memperoleh pengetahuan dan kemampuan sebagai Analisis Kebijakan yang nantinya dapat menjadi modal untuk mengikuti sertifikasi profesi Analisis Kebijakan sesuai standar dalam KKNI Profesi Analisis Kebijakan di Indonesia.

Pelatihan Kompetensi Analisis Kebijakan telah dilaksanakan di Hotel Best Western Makassar selama lima hari dari tanggal 12-16 November 2018. Tiga puluh peserta terpilih dari berbagai latar belakang baik dari ASN maupun Non-ASN



Foto : Rio Affuddin /Yayasan BaKTI

seperti pemerintah pusat dan daerah (provinsi maupun kabupaten dan kota), perguruan tinggi dan akademisi, pihak swasta, mitra pembangunan internasional, organisasi masyarakat sipil, maupun PKP2A IILAN Makassar.

Instruktur pelatihan ini adalah para ahli bidang kebijakan publik yang berpengalaman, yaitu Ibu Erna Irawati (Kepala Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan atau PUSAKA-LAN), Pak Alam Tauhid Syukur (Pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi – LAN Makassar), dan Pak Andi Taufik (Kepala Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan II LAN atau PKP2A IILAN Makassar).

Di hari pertama pelatihan, peserta dibekali dengan Konsep dan Studi Kebijakan Publik dan Metodologi Kajian/ Penelitian Kebijakan (Pengenalan *Evidence-Based Policy*) yang dibawakan oleh Ibu Erna Irawati. Dalam pemaparannya, Ibu Erna menyoroti definisi dan konsepsi kebijakan publik. Pendefinisian ini penting mengingat adanya berbagai literatur, referensi dan perspektif yang bervariasi mengenai kebijakan publik. Mengikuti definisi Thomas Dye (1978) misalnya, hampir semua yang diputuskan atau tidak diputuskan pemerintah termasuk dalam definisi kebijakan. Sedangkan Lemay (2002) menyebut kebijakan sebagai reaksi atas

masalah publik yang muncul, dan kemampuan menyelesaikan masalah publik tersebut menjadi titik sentral dalam kebijakan publik. Dari berbagai definisi ini kemudian disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah keputusan suatu pemerintah untuk mengatur berbagai bidang kehidupan dalam bernegara.

Selanjutnya Ibu Erna menjelaskan proses kebijakan publik terdiri atas: penetapan agenda kebijakan, yaitu proses menentukan masalah publik yang akan diselesaikan; formulasi kebijakan, yaitu proses menentukan dan menyusun kebijakan yang akan digunakan dalam memecahkan masalah; implementasi kebijakan, yaitu tahapan dimana kebijakan yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh organisasi tertentu dengan memobilisasi dana, sumberdaya dan komunikasi kepada khalayak untuk mendukung kelancaran pelaksanaannya; terakhir evaluasi kebijakan, yaitu tahap melakukan penilaian kebijakan atau kebijakan yang telah diimplementasikan.

Pada sesi Pengenalan *Evidence-Based Policy* (EBP), Ibu Erna menjelaskan bahwa EBP adalah sebuah pendekatan yang menggunakan dan memanfaatkan data yang memadai untuk mendukung proses pengambilan keputusan,



Foto : Rio Affuddin /Yayasan BaKTI



## Konsultasi publik merupakan sebuah keharusan di suatu negara demokrasi. Melalui proses ini, terjadi hubungan dua arah antara pemerintah dan masyarakat.

---

merancang pencapaian target dan tujuan kebijakan/program serta membantu dalam implementasinya. Sebelum adanya EBP, kebijakan publik dirumuskan berdasarkan opini atau insting para pembuat kebijakan dalam memecahkan persoalan publik.

Di hari berikutnya, peserta melakukan praktik analisis kebijakan publik, yaitu aktivitas teoritis dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, menilai secara kritis, dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang proses kebijakan. Peserta dibagi menjadi enam kelompok diskusi yang menganalisis isu-isu kebijakan dan menganalisis kebijakan berbasis bukti. Ibu Erna memandu diskusi antar kelompok dengan interaktif agar pemahaman peserta lebih menyeluruh dan lebih aktif berkomunikasi serta bertukar pikiran dengan kelompok dan peserta lainnya.

Peserta kemudian melakukan identifikasi masalah kebijakan dengan mengeksplorasi metode pengumpulan data yang mendukung

masalah kebijakan yang menjadi akar utama masalah. Selanjutnya, peserta menetapkan kriteria dan mengembangkan alternatif kebijakan, dan diakhir sesi melakukan praktik sederhana untuk mengevaluasi alternatif kebijakan menggunakan *Cost-benefit Analysis*. Setiap kelompok memberikan presentasi terhadap temuan dan analisis yang mereka lakukan, yang kemudian mendapatkan masukan dari instruktur dan kelompok lainnya.

Bapak Andi Taufik, Kepala PKP2A II LAN Makassar menjadi instruktur di hari ketiga dengan materi *Stakeholders Mapping*. Sesi ini bertujuan agar peserta pelatihan mampu melakukan analisis pemangku kepentingan dalam proses kebijakan. Proses *stakeholders mapping* meliputi konsepsi analisis pemangku kepentingan, identifikasi pemangku kepentingan, hubungan antar pemangku kepentingan, dan perumusan strategi komunikasi dengan *stakeholders* dalam proses kebijakan.



Foto : Rio Affiuddin /Yayasan BaKTI

Isu yang mengemuka dalam sesi ini adalah terjadinya pergeseran paradigma dari *government* menjadi *governance* menuntut pembuat dan analis kebijakan untuk memahami *stakeholders mapping*. Analisa dari para ahli yang berkecimpung dalam proses kebijakan memberikan informasi penting mengenai siapa saja yang akan dipengaruhi dan dapat memengaruhi proses maupun hasil dari sebuah kebijakan serta pihak mana saja yang harus terlibat. Selain itu analisa dari para ahli juga dapat mengidentifikasi siapa saja yang perlu ditingkatkan kapasitasnya agar dapat terlibat aktif dalam proses penyusunan kebijakan.

Ibu Erna Irawati kembali menjadi instruktur pelatihan di hari keempat, dengan materi Teori dan Praktik Penyusunan Saran Kebijakan (*Policy Briefs*). *Policy Briefs* sendiri adalah dokumen ringkas dan netral, yang berfokus pada analisis suatu isu tertentu yang membutuhkan perhatian pengambil kebijakan. PB memaparkan alasan dan rasional pemilihan alternatif kebijakan tertentu yang ada pada tataran perdebatan kebijakan. *Policy Briefs* juga menawarkan berbagai pertimbangan atas berbagai opsi kebijakan kepada pejabat tertentu, seperti praktisi pemerintahan, birokrasi, politisi dan mitra pembangunan.

Para peserta kemudian bekerja di dalam enam kelompok, menyoroti suatu kebijakan yang ditentukan sendiri oleh kelompok masing-masing

untuk kemudian disusun dalam sebuah ringkasan *policy brief*. Setelah berdiskusi dan melakukan proses penyusunan *policy brief*, setiap kelompok kemudian memaparkan hasil penyusunan mereka. Intinya, *policy brief* memiliki dua tujuan utama, yaitu sebagai media eksplorasi dan advokasi. Sebagai media advokasi, *policy briefs* memberikan pilihan terhadap sebuah solusi kebijakan tertentu, sedangkan sebagai media eksplorasi, *policy briefs* terdiri atas diskusi, pembahasan dan perdebatan tentang masalah kebijakan dan berbagai alternatif solusi tanpa memberikan suatu rekomendasi terpilih.

Di hari terakhir pelatihan, Bapak Alam Tauhid Syukur dari STIA-LAN Makassar hadir sebagai instruktur Konsultasi Publik dan Advokasi Kebijakan.

Dalam pemaparannya, Bapak Alam Tauhid Syukur menjabarkan konsultasi publik sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan. Untuk itu, konsultasi publik merupakan sebuah keharusan di suatu negara demokrasi. Melalui proses ini, terjadi hubungan dua arah antara pemerintah dan masyarakat, meskipun dalam praktiknya konsultasi publik tidak selalu berada dalam tingkatan deliberatif atau partisipatif dalam pelibatan publik, karena pengambilan keputusan tetap dilakukan oleh pihak eksekutif selaku lembaga pemegang kewenangan. Empat tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses konsultasi publik yaitu; pertukaran informasi, konsultasi, pelibatan, dan kolaborasi.

Dalam pemaparan tentang advokasi kebijakan, Bapak Alam Tauhid membekali peserta pelatihan untuk membangun kompetensi politis dengan pemahaman tentang proses advokasi kebijakan publik melalui pembelajaran teknik dasar serta kerangka dasar advokasi dalam kebijakan publik. Advokasi kebijakan adalah sebuah aksi kolektif yang terencana untuk memengaruhi kebijakan yang melibatkan semua pemangku kepentingan yang diarahkan untuk mengatasi isu-isu dan masalah-masalah spesifik melalui kebijakan publik. Advokasi dalam kaitannya dengan proses kebijakan publik dapat dilakukan untuk mendorong implementasi kebijakan baru, merevisi kebijakan yang ada, serta mendorong evaluasi kebijakan.

#### INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Indeks Kualitas Kebijakan dan kerjasama BaKTI, KSI-LAN untuk Peningkatan Kompetensi Analis Kebijakan, dapat menghubungi [info@bakti.or.id](mailto:info@bakti.or.id)



Foto : Farid Wajdi / Yayasan BaKTI

## Saoraja AMPL Award 2018 Sulawesi Selatan

# Memberi Apresiasi, Menguatkan Advokasi

Oleh **YUDI WIJANARKO** dan **HAMSAH SINRING**

**S**aoraja AMPL Awards 2018 yang digelar 14 November lalu memberi makna penting bagi peningkatan perhatian Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan pada isu-isu sektor Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL). Kegiatan ini adalah pertama kali dilaksanakan di Sulawesi Selatan untuk mengapresiasi capaian-capaian kabupaten/kota dalam pembangunan dan layanan AMPL. Selain itu, kegiatan ini sebagai bentuk advokasi terbesar bagi para Kepala Daerah baik di tingkat kabupaten/kota maupun Provinsi.

Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman, Kedeputusan Bidang Pengembangan Regional Bappenas Ibu Tri Dewi Virgiyanti, memuji dan mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) AMPL Provinsi Sulawesi Selatan. "Belum banyak yang seperti Sulawesi Selatan ini, ini langkah yang baik dan perlu direplikasi provinsi lain di Indonesia,"ujarnya.



Foto : Farid Wajdi / Yayasan BaKTI



Foto : Farid Wajdi / Yayasan BaKTI

## ***Stunting* ternyata tidak hanya akibat gizi buruk, *stunting* diketahui sebagai dampak dari sanitasi buruk.**

Ibu Tri Dwi mengingatkan perlu langkah strategis dan taktis dalam pembangunan dan layanan AMPL. Upaya yang dilakukan Pokja AMPL Sulawesi Selatan sebagai upaya strategis untuk **m e m a i n k a n p e r a n d a n m e n d o r o n g** kabupaten/kota mencapai tujuan layanan AMPL. AMPL perlu dikerjakan secara sinergis, integral dan berkelanjutan. Untuk mengejar capaian akses layak sanitasi dari tahun 2017 baru 67,54% dan dasar 9,37%. Padahal target di tahun 2019 adalah 85% layak dan 15% dasar.

“Perlu kerja bersama dan bersinergi untuk mencapai target yang telah dicanangkan,” tandasnya.

Untuk mencapai target 2019 Pemerintah Pusat telah menyusun berbagai skenario peningkatan akses sanitasi. Upaya tersebut di antaranya adalah dengan menambah akses layak bagi 70 juta jiwa penduduk, menghentikan kebiasaan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) sebanyak 29 juta jiwa dan membangun instalasi pengolahan lumpur tinja di 37 kabupaten/kota.

“Sedangkan untuk target pasca 2019 adalah target akses sanitasi aman 100 persen di tahun 2030,” tambahnya.

Satu pesan penting yang disampaikan Tri Dewi Virgiyanti dalam sambutannya adalah dampak

sanitasi buruk pada pertumbuhan bayi. Akibat sanitasi buruk bayi kini tumbuh kerdil (*stunting*). Bahkan dikatakan, berdasarkan Riset Kesehatan Dasar tahun 2013 angka korelasi antara penduduk yang tidak memiliki akses jamban sehat berhubungan kuat dengan *stunting* sebesar 0,66%.

Mengutip data dari Kementerian Kesehatan, berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 prevalensi *stunting* di Indonesia mencapai 37,2 persen. Semua pihak diharapkan waspada karena *stunting* ternyata tidak hanya akibat gizi buruk, *stunting* diketahui sebagai dampak dari sanitasi buruk.

Pendapat sebelumnya tentang *stunting* diasumsikan disebabkan kurang gizi, tapi hasil survei menyatakan hal itu juga sebagai akibat dari sanitasi yang buruk. Dampak sanitasi buruk bukan hanya sekedar diare dan diobati sembuh, tapi *stunting* adalah dampak jangka panjang yang akan memengaruhi kualitas anak bangsa Indonesia.

Secara kesehatan dijelaskan bahwa sanitasi buruk mengakibatkan kerusakan dinding usus yang mengganggu penyerapan zat gizi makanan. Hal ini berdampak pada gangguan tumbuh kembang pada bayi dan balita, sehingga berakibat *stunting*.

Sementara itu kondisi layanan AMPL di Sulsel menyebutkan sebanyak 32,58 persen masyarakat di Sulsel belum memperoleh layanan air minum aman. Sebanyak 780 desa atau 25,59% belum terlayani air minum. Kondisi lebih memprihatinkan lagi menyebutkan bahwa ketersediaan sumber air bersih semakin berkurang.

Untuk layanan sanitasi, masih terdapat 7,66% masyarakat yang melakukan Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Selain itu untuk persampahan sebanyak 23% sampah perkotaan tidak terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir



Foto : Farid Wajdi / Yayasan BaKTI



Foto : Farid Wajdi / Yayasan BaKTI

(TPA) dan tumpukan sampah mencapai 3,5 juta kilogram perhari.

Dengan kondisi di atas, kita masih menghadapi banyak tantangan dan harus terus membangun, bekerja cerdas, dan terus berinovasi. Kondisi layanan AMPL itu juga yang menjadi motivasi bagi Pokja AMPL Provinsi Sulsel menghadirkan Saoraja AMPL Award 2018 sebagai forum advokasi penguatan komitmen untuk pembangunan dan inovasi di bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Demikian ditegaskan oleh Kepala Bappeda, dalam sambutan yang dibacakan oleh Ir. H.A.M. Arifin Iskandar, M.Si, Kepala Bidang Infrastruktur SDA dan Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan.

### Peraih Saoraja AMPL Award 2018

Penganugerahan Saoraja AMPL Award 2018 yang berlangsung di Hotel Claro Makassar diikuti oleh

250 peserta nasional, provinsi, dan Tim Pokja AMPL 20 kabupaten/kota. Sejumlah pejabat yang hadir antara lain Gubernur Sulawesi Selatan, yang diwakili oleh Sekda Provinsi, Bapak Dr. Ashari Fakhshir Radjamilo, M.Si., Chief of WASH UNICEF Indonesia, Ann Thomas, Tim Manager USDP (Urban Sanitation Development Program), Mees Van Krimpen, serta sejumlah kepala daerah bupati dan walikota yang didampingi oleh pimpinan OPD Tim Pokja AMPL masing-masing.

Gubernur Sulsel diwakili Sekda Provinsi, Ashari Fakhshir Radjamilo, menganugerahkan Saoraja AMPL Award 2018 kepada 13 peraih penghargaan dari delapan kategori. Mereka berhasil menyisihkan 27 nominator setelah melalui tahapan penilaian dokumen portofolio capaian hasil pembangunan AMPL dan verifikasi fakta di lapangan.

Tim penilai dan verifikator praktik pembangunan AMPL berasal dari Tim Pokja Provinsi, unsur program sanitasi nasional serta lembaga independen. Salah satu fokus penilaian dan verifikasi mereka adalah hasil dampak serta unsur-unsur pendukung keberlanjutan dari praktik dan inovasi pembangunan di bidang AMPL dalam tahun 2018.

Pemerintah Provinsi juga memberikan penghargaan kepada empat lembaga non Pemda yang dinilai telah banyak berkontribusi dan membantu pemerintah dan masyarakat di Sulawesi Selatan dalam bidang pembangunan akses Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yakni UNICEF, USDP, Yayasan BaKTI, dan USAID-IUWASH Sulawesi Selatan.

Gubernur Sulawesi Selatan dalam sambutan yang dibacakan Ashari Fakhshir Radjamilo memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada peraih Saoraja AMPL Award dan semua instansi, BUMN, swasta, Kelompok Swadaya Masyarakat, tokoh-tokoh penggiat sanitasi, serta seluruh pihak yang terus bekerja sama membantu Sulsel untuk mencapai target Akses Universal 100-0-100 tahun 2019 atau target 100% akses layanan air minum, 0% kawasan kumuh dan 100% akses layanan sanitasi. Untuk mencapai target itu, gubernur mengajak semua pihak untuk mensosialisasikan ke masyarakat tentang komitmen sanitasi dan air minum tuntas di

seluruh daerah Sulawesi Selatan, yang disingkat Komitmen SATU SUARA Sulawesi Selatan.

Komitmen Satu Suara Sulawesi Selatan yang dimaksudkan Gubernur adalah berkomitmen untuk: menjamin ketersediaan air bersih di seluruh wilayah termasuk daerah terisolir dan pulau-pulau; pencapaian provinsi ODF (*Open Defecation Free*) / Bebas dari Buang Air Besar Sembarangan; perilaku hidup bersih dan sehat oleh seluruh masyarakat; peningkatan Layanan air minum, air limbah domestik dan persampahan berkelanjutan; peningkatan sumber-sumber

pendanaan untuk pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi; kolaborasi penanganan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni; penguatan kelembagaan koordinasi, regulasi, serta kelembagaan operasional pelaksana. Komitmen inilah yang menjadi mandat bersama kita pada tahun-tahun berikutnya. Demikian Ashari Fakhshirrie menyampaikan pesan kepada seluruh kepala daerah dan undangan yang hadir dalam kegiatan Saoraja AMPL Award 2018.

## PERAIH SAORAJA AMPL AWARD 2018 SULAWESI SELATAN

NO.	KATEGORI PENGHARGAAN	PERAIH SAORAJA AMPL AWARD
1.	Kabupaten/Kota Terbaik dalam Pembangunan AMPL	1. Kota Makassar 2. Parepare 3. Bantaeng 4. Palopo
2.	Inovasi Kabupaten/Kota Terbaik dalam Pembangunan dan Layanan AMPL	1. Sidrap 2. Soppeng 3. Takalar
3.	Kabupaten/Kota Terbaik dalam Pengelolaan Informasi AMPL dalam Nawasis (National Water and Sanitation Information Services)	Sidrap
4.	Kabupaten/Kota Terbaik Akselerasi ODF (Open Defecation Free)	Pinrang
5.	Kategori Pemerintahan Desa Terbaik dalam Pembangunan AMPL	Desa Buhung Bundang Kab. Bulukumba
6.	Kategori CSR BUMN dan Swasta Terbaik dalam Pembangunan AMPL	Energy Equity Epic (Sengkang) PTY. Ltd Kab. Wajo
7.	Kategori Kelompok Swadaya Masyarakat Terbaik Penggiat AMPL	KPP Sehati Kab. Gowa
8.	Kategori Tokoh Perorangan Terbaik Penggiat Pembangunan AMPL	Muhammad Sinar, Kab. Barru

### INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Saoraja AMPL Award, hubungi [info@bakti.or.id](mailto:info@bakti.or.id)



Foto : Fauzan Ijazah/KIAT Guru

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Pemuda di Kawasan Timur Indonesia

# Adakah Potensi yang Bisa Diraih ?

Oleh **ATHIA YUMNA**

Peneliti Senior The SMERU Research Institute

Indonesia telah berkomitmen untuk mengadopsi Agenda Pembangunan 2030 dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan di New York, AS pada September 2015. Agenda pembangunan baru ini bertujuan untuk melanjutkan berbagai komitmen bersama, di antaranya untuk mengakhiri kemiskinan, kelaparan, dan mengurangi ketimpangan, serta mengatasi perubahan iklim dan menjaga lingkungan.

Ada 5 (lima) dimensi fundamental dalam TPB yang membedakannya dari agenda sebelumnya (Tujuan Pembangunan Millenium/MDGs). Dimensi-dimensi tersebut adalah: 1) *People*; 2) *Planet*; 3) *Prosperity*; 4) *Peace*; dan 5) *Partnership*. Kelima dimensi fundamental menekankan prinsip *people-centered*, inklusif, universal, kesetaraan,



**Dimensi Fundamental TPB.** (Sumber: UN (2015))

keberlanjutan, dan interdependensi dari seluruh isu, pemangku kepentingan, dan aktor tidak terkecuali pemuda dan remaja yang berperan dalam pencapaian TPB. Tulisan ini akan memotret situasi pemuda di wilayah Timur Indonesia terkait indikator-indikator dalam TPB berdasar Laporan *Baseline* TPB Pemuda dan Remaja di Indonesia yang disusun oleh BAPPENAS dan the SMERU Research Institute dengan bantuan dari UNFPA.

Salah satu pesan kunci dari laporan tersebut adalah pencapaian target TPB Pemuda dan Remaja di wilayah timur Indonesia menghadapi tantangan yang sangat berat karena kondisi *baseline* yang ada sekarang masih jauh tertinggal di banding wilayah lain.

### TPB & Kondisi Pemuda dan Remaja di KTI

Kawasan Timur Indonesia adalah rumah bagi sekitar 13 juta pemuda dan remaja<sup>1</sup> atau sekitar 15 persen dari keseluruhan pemuda dan remaja di Indonesia. Dari 13 juta tersebut, setengahnya (52%) ada di Sulawesi, hampir sepertiganya (28%) ada di Nusa Tenggara, dan sisanya (sekitar 20%) ada di Maluku-Papua. Walaupun jumlah dan proporsinya kecil, kondisi pemuda dan remaja di KTI yang terkait dengan target yang akan dicapai dalam TPB tahun 2030 cenderung lebih buruk dari kondisi pemuda dan remaja di wilayah lain di Indonesia.

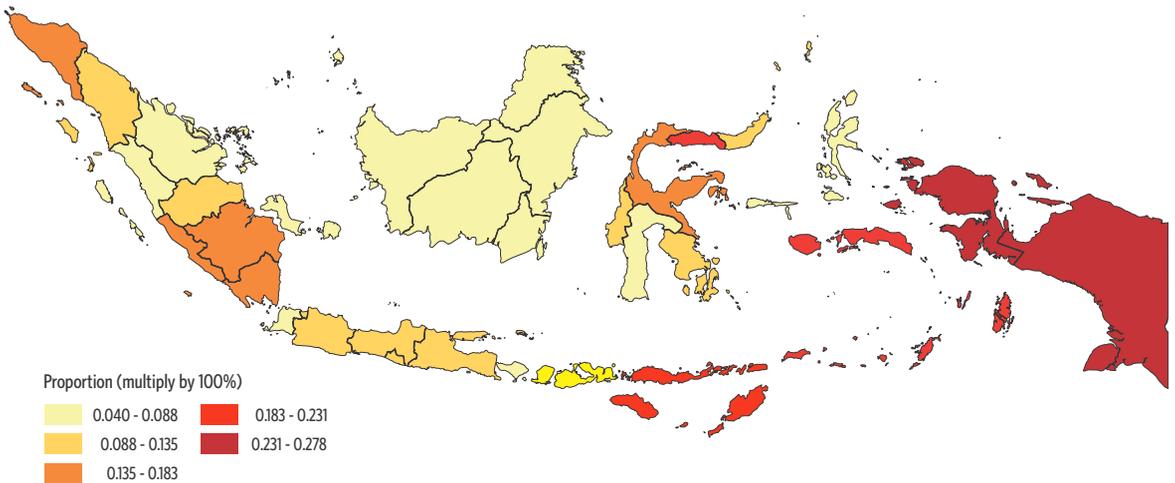
<sup>1</sup>Definisi pemuda dalam tulisan ini adalah mengacu pada UU No. 40/2009 yaitu penduduk yang berusia 16-30 tahun, sedangkan definisi umur remaja adalah mereka yang berusia 10-19 tahun.

Pada 2015, sekitar 15 persen atau 3 dari 20 pemuda dan remaja di KTI adalah pemuda dan remaja miskin. Angka ini adalah 1,5 kali lipat dari angka kemiskinan nasional. Provinsi dengan pemuda dan remaja termiskin di KTI adalah provinsi dengan pemuda dan remaja termiskin di Indonesia (warna merah paling tua dalam Gambar 1) dan hanya ada 3 dari 12 provinsi di KTI yang angka kemiskinan pemuda dan remajanya di bawah angka nasional (Maluku Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara).

Untuk Tujuan Mengatasi Kelaparan, angka prevalensi pemuda dan remaja dengan kerawanan pangan sedang dan berat di KTI adalah sebesar 16,4% atau hampir 2 kali lipat dari angka prevalensi nasional. Bahkan di NTT, 1 dari 3 pemuda dan remaja pernah mengalami kerawanan pangan berat dan sedang. Hanya ada 1 provinsi

di KTI, yaitu Sulawesi Selatan, yang memiliki prevalensi lebih kecil dari prevalensi nasional. Kita tahu bahwa pemuda dan remaja membutuhkan asupan gizi yang cukup untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka agar optimal. Dengan angka *baseline* di atas menunjukkan parahnya permasalahan kecukupan pangan di antara pemuda dan remaja di KTI. Dari data yang ada, persoalan gizi pemuda dan remaja di KTI tidak hanya yang terkait kondisi undernutrisi yang persisten saja, namun juga kasus berat badan berlebih dan obesitas yang meningkat yang dikenal dengan istilah beban ganda nutrisi. Berdasarkan literatur yang ada, kondisi status gizi pemuda dan remaja sangat dipengaruhi oleh akses air minum dan sanitasi yang layak. Jika dilihat dari data yang ada, kondisi akses air minum dan sanitasi layak di KTI memang di bawah angka nasional dan bahkan beberapa di antaranya adalah yang terendah di tingkat nasional, seperti di NTT dan Papua.

Untuk kondisi perilaku berisiko seperti merokok, prevalensi pemuda dan remaja merokok di KTI hampir sama dengan prevalensi nasional (18%) walaupun di beberapa provinsi angkanya jauh di atas nasional. Prevalensi perokok muda tertinggi tingkat nasional ada di NTT (22%). Perilaku berisiko ini memiliki kaitan positif dengan status kesehatan di masa yang akan



**Peta Kemiskinan Pemuda dan Remaja Tingkat Provinsi, 2015**  
(Sumber: Perhitungan BPS dan SMERU)

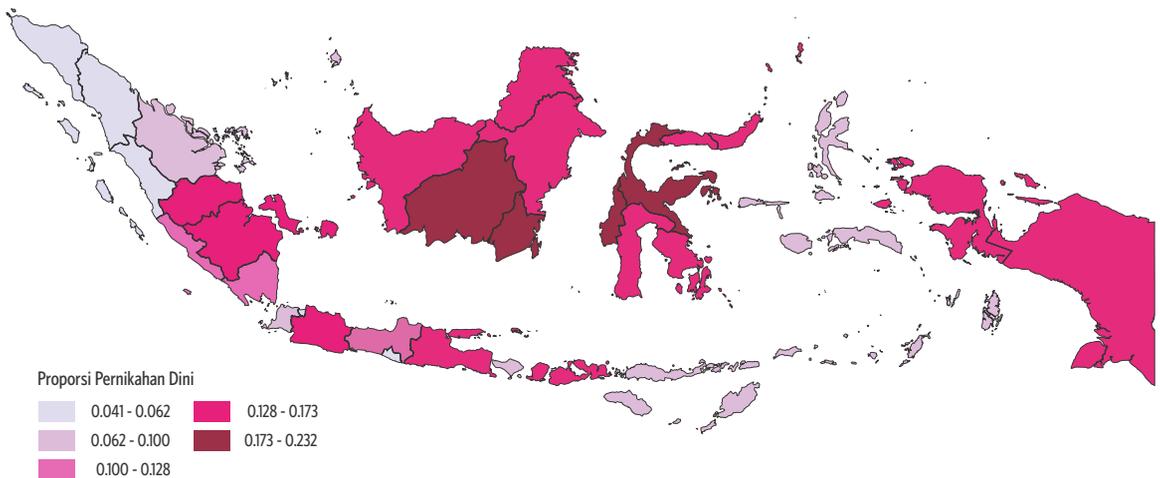
datang. Kelompok ini akan rentan terhadap penyakit kardiovaskular yang merupakan salah satu penyakit paling mematikan di Indonesia.

Di sisi lain, beberapa provinsi di KTI masih termasuk dalam daerah endemis penyakit infeksi menular seperti malaria dan juga HIV/AIDS. Tingginya prevalensi penyakit non-infeksi (*non-*

*communicable disease*) dan pada saat yang sama juga tingginya prevalensi penyakit infeksi menular menunjukkan fenomena beban ganda penyakit yang berdampak pada penurunan produktivitas, peningkatan risiko penyakit degeneratif, dan beban ekonomi dari individu maupun pemerintah dalam mengatasi masalah kesehatan ini.



Foto : Syaifullah/Yayasan BaKTI



**Peta Pernikahan Dini Tingkat Provinsi, 2015**  
(Sumber: perhitungan BPS dan SMERU)

Secara umum, akses pendidikan dasar 6 tahun di KTI sudah cukup tinggi, namun tidak untuk tingkat pendidikan di atasnya. Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMP/ sederajat bahkan masih di bawah angka rata-rata nasional. Sedangkan untuk APK tingkat SMA/ sederajat dan Perguruan Tinggi, angkanya di atas angka nasional, namun disparitas antar provinsi juga sangat tinggi. Perhatian khusus terutama harus ditujukan untuk Provinsi Papua karena APK seluruh tingkat pendidikannya tercatat paling rendah di KTI dan nasional.

Prevalensi pernikahan dini<sup>2</sup> tertinggi di Indonesia sebagian ada di provinsi KTI, terutama Sulawesi, Papua, dan NTB. Di Sulawesi Barat, angka prevalensinya adalah 21,38% yang berarti 1 di antara 5 perempuan muda usia 20-24 tahun yang menikah pernah melakukan praktik pernikahan dini. Angka ini merupakan prevalensi tertinggi di KTI dan nomor dua di Indonesia setelah Kalimantan Selatan.

Tingkat pengangguran terbuka usia 15-30 tahun di beberapa provinsi merupakan yang tertinggi sekaligus yang terendah di Indonesia. Yang tertinggi ada di Maluku (23,9%) dan di Sulawesi Utara (22,7%). Sedangkan yang terendah ada di Sulawesi Barat (7,7%) dan Papua (8,1%) dimana angkanya. Angka pengangguran terbuka

yang tinggi mengindikasikan bahwa penciptaan lapangan kerja di provinsi tersebut rendah dan tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja pencari kerja.

Sebaran akses internet untuk pemuda dan remaja di KTI hampir sama angkanya dengan rata-rata nasional, yaitu 4 dari 10 pemuda dan remaja yang mengakses internet. Namun di beberapa provinsi seperti Papua, Maluku Utara, dan NTT, jumlahnya di bawah angka tersebut. Jika kondisi ini tidak dapat ditingkatkan, pemuda dan remaja di provinsi-provinsi tersebut berpotensi mengalami ketertinggalan dan ketimpangan yang lebih besar lagi terhadap utilisasi dan literasi teknologi dibanding pemuda dan remaja di daerah lain di Indonesia.

### What's Next ?

Pemuda dan remaja di KTI memang menghadapi tantangan yang sangat berat dalam mencapai target yang ada dalam TPB. Potensi pemuda dan remaja di KTI untuk memetik bonus demografi dalam 5-10 tahun mendatang akan sulit terjadi kecuali ada terobosan-terobosan besar untuk membalikkan keadaan yang ada sekarang, salah satunya dengan lebih memberikan kesempatan kepada pemuda dan remaja itu sendiri untuk melakukan perubahan.

<sup>2</sup>Tingkat prevalensi usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun

### INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi penulis [ayumna@smeru.or.id](mailto:ayumna@smeru.or.id)



# Pastor Vesto

## dan Perjuangannya untuk **Orang Asmat**

(Bagian 1)

Oleh **PETRUS SUPARDI**



“ Saya menyadari bahwa cara paling efektif untuk menyapa orang Asmat adalah masuk ke dalam hidup mereka. Saya biasa pergi mengunjungi mereka di rumah atau Jew (rumah bujang suku Asmat). Di sana, kami duduk cerita dan berbagi pengalaman. Demikian halnya, pada saat berpapasan di jalan, saya selalu menyapa mereka.

Pastor Fransiskus Vesto Labi Maing

Pastor Vesto Maing, Pr sedang menyampaikan materi, “Menjadi Kader Yang Melayani” pada saat pelatihan Kader Kampung di Distrik Akat.

Foto : **N.J. Tangkepuyung/Yayasan BaKTI**

**M**anusia Asmat merupakan manusia seni. Seluruh hidup orang Asmat diwarnai pesta. Ada pesta pembangunan jew, pesta ulat sagu, pesta inisiasi dan lain-lain. Asmat juga terkenal dengan tarian dan ukiran yang memesona. Sebagai manusia seni, orang Asmat memiliki karakter unik. Maka, cara memahami orang Asmat membutuhkan seni tersendiri. Jika tidak memahami kebudayaan, adat dan kebiasaan hidup orang Asmat, maka hanya akan melahirkan stigma negatif.

Dalam kondisi orang Asmat yang memprihatinkan itulah Pastor Fransiskus Vesto Labi Maing, Pr, melayani umat Paroki St. Martinus de Pores Ayam, Distrik Akat. Ia berjalan dari kampung ke kampung untuk mengunjungi umat. Pada saat bertemu dengan umat, baik di rumah, di bivak maupun di jew, ia berusaha mendengarkan keluh kesah mereka. Ia tidak hanya mendengarkan, ia juga mengajak mereka untuk menjaga budaya dan adat, terutama jew.

“Saya pernah menangis, tatkala menyaksikan ada tua adat yang membawa masuk pedagang ke dalam jew untuk menggelar dagangannya. Saya panggil tua adat tersebut dan menegur dia. Sebab, jew itu tempat sakral. Orang Asmat sendiri harus menjaga kesakralan jew,” tutur imam Keuskupan Agats, yang biasa disapa Pastor Vesto ini.

Pastor Vesto memberikan perhatian serius terhadap budaya dan adat orang Asmat karena dirinya menyadari bahwa orang Asmat melekat pada adat dan budayanya. Apabila budaya dan adat rusak, maka jati diri dan masa depan orang Asmat terancam. Tindakan melindungi budaya dan adat orang Asmat dilakukannya dengan mengundang Komisi Kebudayaan Keuskupan Agats untuk memberikan penguatan terhadap para tokoh adat di Ayam, Distrik Akat.

“Saya prihatin dengan budaya dan adat orang Asmat yang mulai pudar. Ada jew yang sudah sepi, tungku api tidak pernah menyala. Karena itu, tahun 2016 dan 2017, saya mengundang Bapa Emerikus Sarkol dan John Ohoiwirin dari Komisi Kebudayaan Keuskupan Agats, datang memberikan penguatan kepada para tokoh adat (wayir) di jew Jowes dan Cumnew,” tuturnya.



Foto : N.J. Tangkepuyung/Yayasan BaKTI

Pastor Vesto tidak hanya memperhatikan kebudayaan dan adat orang Asmat di Distrik Akat. Ia juga memberi perhatian serius pada dunia pendidikan, terutama pendidikan dasar. “Di pusat Distrik Akat, ini ada tiga SD yaitu SD YPPK St. Martinus de Pores Ayam, SD YPPGI Ayam dan SD Negeri Persiapan Cumnew dan satu TK di Jowes. Saya pergi ke sekolah-sekolah itu. Di gereja, saya umumkan kepada semua orang tua untuk perhatikan sekolah dan bawa anak-anak ke sekolah,” tegasnya.

Pastor Vesto tidak hanya bicara. Ia berjalan dari kampung ke kampung dan memastikan bahwa anak-anak ke sekolah. Ia mengajak polisi dan Linmas yang ada di Ayam untuk mencari anak-anak dan bawa ke sekolah. Ia berkisah bahwa dirinya pernah mencari anak-anak sekolah sampai ke bivak-bivak. “Saya pergi ambil anak-anak sekolah di bivak, persis di pinggir kali. Orang tua membawa anak-anak itu saat mencari makanan di dusun. Saya pergi ambil itu anak-anak, kasih masuk di dalam *long boat* dan bawa pulang ke kampung Ayam supaya anak-anak bisa sekolah,” tuturnya.

Pastor Vesto menyadari bahwa saat ini pendidikan belum menjadi kebutuhan bagi orang Asmat. Ia tidak menyalahkan orang tua, karena kondisi alam Asmat telah membentuk karakter manusia Asmat yang unik. Saat ini, orang Asmat dengan mudah mengambil makanan di dusun. Semua tersedia di alam, tidak ada yang kurang. Karena itu, perlu pendekatan khusus untuk membangun kesadaran orang tua supaya mengantar anak-anak ke sekolah.

Selain pendidikan, Pastor Vesto selalu mengunjungi Puskesmas Ayam. Ia selalu memastikan bahwa ada petugas kesehatan di Puskesmas supaya kalau ada masyarakat yang sakit dan berobat ke Puskesmas dapat terlayani dengan baik. Meskipun di pusat distrik Akat, Puskesmas Ayam selalu buka, tetapi Pustu di kampung-kampung sering ditinggalkan oleh petugas kesehatan.

Ia juga berbagi pengalaman tentang kebiasaan orang Asmat memahami sakit. “Di Asmat ini, orang merasa sakit dan mau ke Puskesmas atau rumah sakit kalau sudah tidak bisa bangun dan tidak bisa jalan. Kalau sakit tetapi masih bisa



Foto: N.J. Tangkepuyung/Yayasan BaKTI

bangun dan jalan, orang tidak mau pergi periksa ke Puskesmas. Karena itu, petugas kesehatan harus pro aktif mengunjungi warga dan tanya kondisi kesehatan mereka, tuturnya.

Berhadapan dengan kondisi orang Asmat yang unik itu, Pastor Vesto memiliki pendekatan pastoral khusus yaitu kunjungan langsung ke rumah-rumah atau jiw. Ia berjalan mengelilingi lima kampung di pusat Distrik Akat yaitu, Waw Cesau, Ayam, Bayiw Pinam, Cumnew dan Jowes. Sedangkan enam kampung di luar Agats dilakukannya saat kunjungan pastoral.

Ia menjelaskan bahwa supaya bisa menyapa orang Asmat, setiap orang yang datang ke Asmat harus memiliki hati melayani, bukan memberikan stigma. Pelayanan paling utama adalah mengunjungi dan menyapa orang Asmat dalam cara hidup mereka. “Kalau mau tahu orang Asmat punya hidup harus kunjungi mereka. Harus sapa mereka. Harus datang ke rumah mereka. Harus masuk ke dalam jiw,” tegasnya.

Pastor Vesto menuturkan bahwa dirinya selalu menyapa setiap pribadi yang dijumpainya pada saat berkeliling kampung. “Saya biasa pergi ke

kampung-kampung. Saya masuk ke dalam jiw dan bercerita dengan mereka. Jika kita sering bertemu, maka akan mempermudah dalam menjalin kerjasama dengan masyarakat karena sudah saling kenal.”

Dalam pergaulan dengan orang Asmat yang dilayaninya, Pastor Vesto juga belajar bahasa Asmat. Meskipun tidak lancar, tetapi ia sering menyapa menggunakan sapaan dalam bahasa Asmat sehingga menyentuh lubuk hati.

Di tengah berbagai keterbatasan biaya transportasi untuk melakukan kunjungan ke kampung-kampung di luar pusat Distrik Akat, Pastor Vesto tetap bersemangat. Dirinya yakin bahwa setiap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, Tuhan akan menolongnya. Keyakinannya pada pertolongan Tuhan membakar semangatnya melintasi setiap rintangan yang menghadang. Medan pastoral yang sulit serta karakter manusia Asmat yang unik memacu dirinya berinovasi.

Ia tidak tinggal saja di pastoran. Ia berkeliling memperhatikan kampung, sekolah dasar, Puskesmas Ayam dan memotivasi masyarakat membentuk kelompok tani. Dirinya tidak memiliki uang untuk membantu berbagai kekurangan yang ada di sekolah dasar, Puskesmas Ayam dan kampung-kampung di Distrik Akat. Semangatnya dalam menyapa setiap komunitas dan pribadi yang ditemuinya membuat dirinya dikenal luas di Distrik Akat, bahkan di Kabupaten Asmat.

### **Berpastoral Bersama LANDASAN**

Awal Maret 2017, Pastor Vesto berjumpa dengan Koordinator LANDASAN Papua Kabupaten Asmat, Pit. Keduanya bercerita tentang proses pendampingan yang akan diberikan oleh LANDASAN Papua. Menurut Pit, LANDASAN Papua bekerja secara terintegrasi dengan kampung, sekolah dasar, Puskesmas, pencegahan dan pengendalian HIV-AIDS. Pusat integrasi seluruh unit layanan terletak di distrik tetapi integrasi sebenarnya harus dimulai dari kampung.

*(Bersambung)*

### **INFORMASI LEBIH LANJUT**

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Program KOMPAK-LANDASAN II dapat menghubungi [info@bakti.or.id](mailto:info@bakti.or.id)



# Pelaminan Bukan Tempat Bermain Anak

Oleh **M. GHUFRAN H. KORDI K.**

**Y**ayasan BaKTI melalui Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pembedayaan Perempuan) yang bergabung dalam Koalisi Stop Perkawinan Anak, melaksanakan Peringatan Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKtP) 2018, dalam bentuk Temu Remaja Sulawesi Selatan di Gedung Serba Guna Kabupaten Maros, 26 November lalu. Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan pencegahan perkawinan anak dan melihat bagaimana respon anak mengenai perkawinan anak.

Suasana kegiatan peringatan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP) di gedung serbaguna Kantor Bupati Maros yang diikuti oleh para remaja sekolah menengah dari Kabupaten Maros, Gowa, Pangkep dan Kota Makassar. Kegiatan ini dibuka oleh Direktur Eksekutif Yayasan BaKTI, M. Yusran Laitupa dan dihadiri oleh pejabat daerah setempat.

Foto : **Frans Gosali/Yayasan BaKTI**

Sementara Direktur Yayasan BaKTI, Muhammad Yusran Laitupa dalam sambutannya mengatakan, Yayasan BaKTI memilih kegiatan yang memberi kesempatan kepada anak-anak berdiskusi dan pentas seni. Tema diskusi anak-anak adalah 'Anak Berbicara tentang Perkawinan Anak'. Ini terkait dengan tema peringatan HAKTP tahun 2018 "Gerak Bersama untuk Pencegahan Perkawinan Anak" dengan mengkampanyekan "Pelaminan Bukan Tempat Bermain Anak."

Anak berbicara tentang perkawinan anak adalah bagian dari upaya pemenuhan hak-hak anak, sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak, khususnya prinsip penghargaan terhadap pandangan anak (respect for the views of the child). Prinsip ini menegaskan bahwa pandangan anak, terutama menyangkut hal-hal yang memengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 Konvensi Hak Anak.

### **Anak Berbicara Perkawinan Anak**

Perkawinan anak masih dianggap sebagai hal biasa di masyarakat. Tradisi mengawinkan anak perempuan yang telah menstruasi dilihat sebagai suatu prestasi oleh sebagian masyarakat. Jika seorang anak perempuan yang menstruasi dan dilamar, maka orangtua atau keluarganya tidak menolak, karena memercayai mitos bahwa jika lamaran ditolak maka anak tersebut tidak akan dilamar lagi.

Anak perempuan yang akan dikawinkan tidak pernah diajak berdiskusi. Anak harus menerima setiap keputusan yang dibuat orangtua atau keluarga, karena anak dianggap belum mampu membuat pertimbangan dan keputusan untuk masa depan dirinya. Namun, anak yang dianggap belum mampu itu harus siap untuk berumah tangga.

Bagaimana pendapat anak tentang Perkawinan Anak di Temu Remaja Sulawesi Selatan? Dari diskusi kelompok yang juga dipandu oleh anak-anak, diperoleh berbagai informasi dan pandangan anak mengenai perkawinan anak.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan anak dari Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Gowa, dan Kota Makassar. Selain anak yang merupakan peserta utama untuk Temu Remaja Sulawesi Selatan, kegiatan ini juga dihadiri oleh instansi pemerintah dan lembaga/organisasi non pemerintah.

Peringatan HAKtP 2018 di Sulawesi Selatan dilaksanakan oleh gabungan berbagai organisasi yang bergabung di Koalisi Stop Perkawinan Anak yang berlangsung selama 16 hari mulai 25 November hingga 10 Desember. Dalam rentang waktu 16 hari tersebut dilaksanakan berbagai kegiatan di berbagai daerah di Sulawesi Selatan.

Kegiatan Temu Remaja dibuka oleh Wakil Bupati Maros, A. Harmil Mattotorang. Dalam sambutan pembukaannya, Wakil Bupati Maros menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Maros bekerja keras untuk mencegah perkawinan anak, diantaranya dengan mengesahkan Peraturan Daerah mengenai Kabupaten Layak Anak dan Pengarusutamaan Gender.



## Anak yang menikah tidak siap secara mental dan emosional sehingga sering mengalami kekerasan atau pun melakukan kekerasan terhadap pasangannya.

Hasil diskusi kelompok tema 'Peran Pemerintah Desa dalam Pencegahan Perkawinan Anak' menyoroti Pemerintah Desa juga ikut melegalkan perkawinan anak, seharusnya Pemerintah Desa harus lebih berperan dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Sementara Kelompok yang mendiskusikan 'Peran Masyarakat dalam Pencegahan Perkawinan Anak' menyebutkan bahwa mitos di masyarakat mengenai pelamaran menjadikan masyarakat menganggap perkawinan anak sebagai sesuatu yang sah. Perlu penyadaran di masyarakat mengenai hak-hak anak.

Kelompok yang mendiskusikan 'Peran Guru dan Sekolah dalam Pencegahan Perkawinan Anak' menyatakan bahwa guru dan sekolah mempunyai posisi yang strategis untuk mencegah perkawinan anak, karena sebagian besar anak yang dikawinkan masih berstatus sebagai murid di sekolah. Namun, selama ini guru dan sekolah tidak mampu berbuat sesuatu untuk mencegah apabila

mendapatkan informasi mengenai anak didiknya yang akan dikawinkan.

Dalam diskusi kelompok, anak-anak mengusulkan kepada semua pihak untuk mensosialisasikan dampak negatif perkawinan anak. Pemerintah harus mencegah perkawinan anak dengan membuat aturan tegas untuk melarang perkawinan anak.

### Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan

Perkawinan anak adalah kekerasan terhadap anak dan perempuan. Ini adalah kesimpulan diskusi kelompok anak-anak. Mereka mengidentifikasi sendiri bentuk kekerasan terhadap anak dan perempuan. *Pertama*, perkawinan anak adalah keputusan orangtua dan keluarga dengan berbagai alasan. Kemiskinan adalah alasan umum, keinginan orangtua untuk melepaskan tanggungjawab kepada pihak lain atau suami adalah alasan lainnya. Dengan mengawinkan anaknya, walaupun dengan pasangan yang juga tidak siap, maka tanggungjawab sebagai orangtua dianggapnya telah selesai.

*Kedua*, perkawinan anak menyebabkan anak putus sekolah. Umumnya anak-anak yang dikawinkan, maka haknya sebagai anak dalam memperoleh pendidikan akan terputus. Selain lingkungan sekolah yang menganggap aneh jika seorang anak telah menikah untuk kembali ke sekolah, dengan menjadi istri atau suami, maka anak-anak yang telah menikah mempunyai beban



Peserta kegiatan HAKTP yang sebagian besar adalah remaja dibagi dalam beberapa kelompok *Focus Group Discussion* (FGD) untuk mendengarkan pendapat mereka tentang dampak pernikahan dini dan tindakan pencegahan yang dapat dilakukan. Diakhir kegiatan dilakukan deklarasi bersama dan pernyataan sikap menolak perkawinan anak.

Foto : **Frans Gosali/Yayasan BaKTI**.

dan tanggung jawab baru dalam rumah tangganya sehingga sulit untuk melanjutkan pendidikannya.

*Ketiga*, perkawinan anak menyebabkan anak mengalami kekerasan fisik dan mental. Selain mengawinkan anak adalah kekerasan, dengan menikah anak akan mengalami kekerasan baru, baik fisik maupun mental. Anak yang menikah tidak siap secara mental dan emosional sehingga sering mengalami kekerasan atau pun melakukan kekerasan terhadap pasangannya.

*Keempat*, perkawinan anak melahirkan perempuan pekerja informal. Dengan kemampuan dan keterampilan yang rendah, baik anak perempuan atau laki-laki yang telah menikah, sebagian akan masuk ke dalam lingkungan kerja informal yang rentan eksploitasi dan gaji rendah.

Jika terjadi perceraian, maka perempuanlah yang menjadi pihak yang beresiko, karena akan menjadi orang tua tunggal di usia yang sangat muda. Karena tidak mempunyai keterampilan, maka akan menjadi tenaga kerja di sektor-sektor informal, termasuk sektor yang eksploitatif dan berbahaya, seperti pekerja seks komersial, termasuk mudah menjadi korban *trafficking* atau perdagangan manusia.

*Kelima*, perkawinan anak menyebabkan kekerasan terhadap anak. Banyak kasus kekerasan terhadap anak dilakukan oleh orangtua yang

masih sangat muda. Karena tidak memiliki keterampilan dalam pengasuhan anak dan tidak siap menjadi orangtua, maka orangtua muda sering melakukan kekerasan terhadap anak.

Pertemuan Remaja Sulawesi Selatan yang memfasilitasi anak-anak berdiskusi pun merekomendasikan agar sosialisasi pencegahan perkawinan anak menjadi agenda semua pihak, termasuk anak dan Forum Anak. Anak-anak yang hadir pada kegiatan ini juga siap menjadi pelapor dan pelopor pencegahan perkawinan anak.

Anak-anak perlu diberi haknya untuk menjalani kehidupan yang normal sebagai anak, tidak dipaksa untuk menjadi orangtua sebelum waktunya. Anak-anak yang dipaksa menjadi orangtua sebelum waktunya, hanyalah orangtua instan yang akan melahirkan generasi instan dan tidak berkualitas. Karena itu, hentikan perkawinan anak karena pelaminan bukan tempat bermain anak.

#### INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Program MAMPU-BaKTI dapat menghubungi [info@bakti.or.id](mailto:info@bakti.or.id)



## Masyarakat Terlibat, Hasil Belajar Murid Meningkatkan

### *Community Involvement Improves Student and Teacher Performance*

**SETIAWAN CAHYO NUGROHO,  
HERA DIANI & SHARON KANTHY**

**P**rogram KIAT Guru berbagi pengalaman pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar di daerah sangat tertinggal lewat *talkshow* dan pameran di Festival Forum Kawasan Timur Indonesia (Forum KTI) VIII. Festival Forum KTI yang berlangsung di Makassar pada 24-25 Oktober 2018 ini bertujuan mengangkat praktik-praktik cerdas dan inovasi pembangunan lokal

**T**he KIAT Guru Pilot Program shared its experiences of the dynamic impact that community involvement in primary school education can have in improving education quality in very disadvantaged areas, in a *talkshow* and exhibition during the recent Eastern Indonesia Forum Festival (Forum KTI) VIII. Held in Makassar on 24-25th October 2018 the festival aimed to disseminate local development



(Foto : Abdurrahman Doge / TNP2K)

dari Kawasan Timur Indonesia untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Talkshow ini dihadiri 147 peserta dari perwakilan masyarakat, pemerhati pendidikan, pemerintah daerah dan mitra pembangunan lainnya. Dalam kegiatan ini peserta dari Sulawesi Selatan, Papua dan Papua Barat menyampaikan ketertarikannya untuk juga menerapkan mekanisme pemberdayaan masyarakat KIAT Guru di lokasi mereka.

### **Kelompok Pengguna Layanan Dorong Peningkatan Kinerja Guru dan Hasil Belajar Murid**

Dengan mengangkat tema 'Masyarakat Terlibat, Hasil Belajar Murid Meningkatkan', diskusi ini menghadirkan narasumber yang berperan besar dalam melaksanakan Program Rintisan KIAT Guru, yaitu perwakilan Kelompok Pengguna Layanan (KPL), kepala sekolah, serta pemerintah daerah.

"Anggota KPL bergiliran melakukan observasi serta mengecek dokumen terkait kegiatan belajar di sekolah. Kami memiliki tujuh prinsip pokok dalam menjalankan tugas kami, yaitu sukarela, akuntabilitas, transparansi dalam menilai, mandiri, profesional, proporsionalitas atau

(Ki-ka): Kartiyus, Kepala Bappeda Sintang, Martinus, perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai Timur, Elfrida, Kepala Sekolah SDN Bea Nanga, dan Alfiana Pamut, Ketua KPL Desa Compang Necak berbagi cerita tentang implementasi KIAT Guru.

*(Left to right): Kartiyus, Head of Sintang Development Agency, Martinus, official from Manggarai Timur Office of Community and Village Empowerment (DPMD), Elfrida, Principal of SD Bea Nanga, and Alfiana Pamut from KPL of Compang Necak Village shared their experience about KIAT Guru implementation.*

innovations and smart practices from Eastern Indonesia.

The talkshow was attended by 147 participants from Eastern Indonesia, including community representatives, education observers, local governments and other development partners. During the forum, participants from South Sulawesi, Papua and West Papua provinces expressed their interest in implementing KIAT Guru's community involvement mechanism in their areas.

### **School User Committees Drive Improvements in Student and Teacher Performance**

With the theme of "Involved Community, Improved Students Performance", the KIAT Guru Pilot talk show discussed the key roles that school stakeholders-School User Committees (especially parents), school principals and local government-have in driving improvements in both teacher and student performances. The role of active School User Committees (KPLs) is especially crucial to driving improvements.

"KPL members take turns to observe service delivery in schools and check relevant documents. We work on seven basic principles: voluntary, accountability, transparency, independent, professional, proportional and cooperation," said Alfiana Pamut, respected community figure and KPL member in Compang Necak Village, Manggarai Timur, East Nusa Tenggara.

Elfrida, principal of SDN Bea Nanga elementary school in Manggarai Timur, emphasized the important role of KPLs in empowering village school communities to keep local education service providers accountable. "In the beginning, KPL members often feel inferior to monitor teachers and principals, so that schools must step in to encourage them. Yet teachers must be open and supportive of the KPL's duties, not only to evaluate teachers but to help teachers identify their weaknesses in delivering their services," she said.



(Foto : Abdurrahman Doge / TNP2K)

bekerja sesuai tupoksi yang diberikan, dan kerja sama,” ujar Alfiana Pamut, seorang tokoh perempuan yang dipilih dan dipercayai oleh masyarakat untuk memimpin KPL di Desa CompangNecak, Manggarai Timur.

Mewakili pihak guru, Elfrida, Kepala Sekolah SDN Bea Nanga di Manggarai Timur, menekankan peran sekolah dalam memberdayakan masyarakat di desanya. “Di awal, KPL pasti sungkan. Tapi pihak sekolah harus mendukung KPL untuk mengevaluasi para guru, dan guru harus mau terbuka dan ikhlas untuk dinilai oleh KPL agar guru juga terbantu dalam mengidentifikasi kekurangan dari layanannya kepada anak didik.”

Kerja sama dan keterbukaan ini turut meningkatkan kinerja para guru dan belajar murid. “Sekarang guru hadir dan menjalankan janji layanannya untuk menggunakan media pembelajaran sehingga murid semakin semangat belajar. Hubungan guru dan murid pun membaik karena adanya janji layanan untuk tidak menggunakan kekerasan di sekolah,” ujar Alfiana. Beberapa bulan yang lalu, saya memandu para masyarakat untuk melaksanakan **Tes Cepat** dan kami juga dapat melihat secara nyata bahwa prestasi murid semakin meningkat,” tambahnya.

Elfrida menambahkan bahwa janji layanan guru yang disepakati bersama masyarakat berkontribusi pada keberhasilan program rintisan. “Janji layanan guru yang disepakati bersama masyarakat beserta penggunaan **KIAT Kamera** untuk merekam kehadiran guru di sekolah membuat guru lebih rajin dan kreatif

**“Secara khusus, praktik baik dalam menerapkan Dana Desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat di pendidikan perlu ditularkan ke desa-desa lainnya”**

**“Good practices in allocating Village Funds for community empowerment activities in the education sector need to be spread to other villages”**

#### **Samsul Widodo**

Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal (Dirjen PDT), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT).

*Director General for the Disadvantaged Region at the Ministry of Villages, Disadvantaged Regions and Transmigration.*

*Such cooperation and openness has resulted in improved performances of both teachers and students. “Teachers attend school more often now and fulfill their service agreements, for example, by using learning props that students are eager to learn with. Student-teacher relationships have also improved. This is related to another service agreement indicator to ban corporal punishment and violence at schools,” said Alfiana. “Several months ago, I led our community to hold a (KIAT Guru Pilot Program) Diagnostic Test and the results show a significant improvement in student academic achievements,” she added.*



(Foto : Abdurrahman Doge / TNP2K)

dalam memberikan pembelajaran yang menyenangkan kepada muridnya.” Alfiana memaparkan lebih lanjut bahwa masyarakat kini semakin menyadari peran mereka dalam perkembangan pendidikan anak mereka.

“Orang tua sekarang sudah mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk terlibat dalam pengawasan pelaksanaan pendidikan sebagaimana tercantum pada UU No 20 Tahun 2003. Kesadaran membuat orang tua menjadi percaya diri saat melakukan penilaian terhadap layanan guru di sekolah kami,” ceritanya.

### **Komitmen dan Tantangan dalam Replikasi Program Rintisan KIAT Guru**

Samsul Widodo, Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal (Dirjen PDT), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), dalam arahannya ketika membuka diskusi, menyampaikan agar Program KIAT Guru didiseminasi ke kabupaten-kabupaten tertinggal lainnya. Beliau menyampaikan, “Secara khusus, praktik baik dalam menerapkan Dana Desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat di pendidikan perlu ditularkan ke desa-desa lainnya. Saat ini, Kemendesa PDTT bersama TNP2K dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sedang menjajaki proses replikasi tersebut khususnya

*Elfrida noted, “The service agreements between teachers and her school community and the use of KIAT Kamera to record teacher’s presence at school have also increased teacher attendance, and teachers are now more creative in making classes more fun and enjoyable,” she said. Parents have also become more aware of their roles in their children’s education through the KIAT Guru pilot program, said Alfiana Pamut.*

*“Parents now realize they have the right to monitor education implementation as stipulated in Law No. 20/2003 [on National Education System]. Their awareness makes KPL members more confident to evaluate teacher performances,” she said.*

### **Commitments and Challenges to Replicating the KIAT Guru Pilot Program**

*Samsul Widodo, a Director General for the Disadvantaged Region at the Ministry of Villages, Disadvantaged Regions and Transmigration, said the KIAT Guru program should be disseminated to other disadvantaged districts.*

*“Good practices in allocating Village Funds for community empowerment activities in the education sector [such as KIAT Guru’s] need to be spread to other villages. Our Ministry, TNP2K, and the Ministry of Education and Culture are all working to replicate KIAT Guru’s initiatives,*



(Foto : Abdurrahman Doge / TNP2K)

dalam mencari cara agar dana desa dapat digunakan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat.”

Kartiyus, Kepala Bappeda Kabupaten Sintang, menyimpulkan bahwa Program Rintisan KIAT Guru telah mendukung kabupatennya dalam tiga hal. **Pertama**, menyiapkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pelaku tingkat desa/sekolah untuk pelaksanaan secara mandiri sehingga membuat Pemerintah Daerah percaya diri untuk melakukan replikasi. **Kedua**, membantu Pemerintah Daerah dalam menemukan model yang tepat untuk mengaitkan pemberdayaan masyarakat dengan peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara, khususnya guru. **Ketiga**, sesuai dengan visi dan misi Bupati untuk mencerdaskan anak. “Di Sintang, Pemerintah Daerah di tahun 2019 telah siap dengan APBD dan APBDes untuk replikasi Program KIAT Guru secara mandiri di 60-an Sekolah Dasar di desa sangat tertinggal,” ujarnya.

KPL Alfiana menyatakan, “Pemerintah Desa sekarang sangat peduli. Perwakilan desa pun hadir dalam pertemuan penilaian bulanan dan mendanai kegiatan KPL sejumlah 20 juta rupiah di tahun 2018 ini.”

*especially in looking for ways to utilize the Village Fund to support community empowerment.”*

*Kartiyus, Head of Sintang Development Planning Agency, Kartiyus, said the KIAT Guru pilot has helped his district in the three following ways. First, it has prepared both local government apparatus and village school stakeholders to confidently replicate the program independent of outside governance. Second, it has assisted local government to find a suitable model to link community empowerment with improvement state civil apparatus performance, in this case teachers. Third, it is in line with the district vision and mission to produce a smarter generation of children. “Sintang is ready to allocate funds from the District and Village Budgets in 2019 to replicate the KIAT Guru program independently in over 60 additional schools in our very disadvantaged regions,” said Kartiyus.*

*“Village government supported the program by participating in monthly evaluation meeting and providing Rp20 million fund for KPL activities in this year,” Alfiana further said.*

*Martinus from the Manggarai Timur Office of Community and Village Empowerment (DPMD), shared how KIAT Guru has become the model*

Martinus, perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Manggarai Timur, menegaskan bahwa KIAT Guru telah menjadi model bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan Dana Desa. Martinus lebih lanjut menjelaskan bahwa wewenang untuk menganggarkan Dana Desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat sebenarnya sudah tercantum di Undang-Undang Desa. Namun, desa-desa perlu dibimbing oleh DPMD dalam menemukan model yang tepat dalam pemberdayaan masyarakat.

Di akhir talkshow, Elfrida menyampaikan bahwa tidak ada halangan berarti untuk dapat memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak “Kalau kita komitmen, pasti jadi! Apapun sekolahnya, situasinya, kondisinya.”

*program for Village Fund utilization for community empowerment development in his district. However, he noted that whilst villages have the authority to use Village Funds for proven models of community empowerment, like KIAT Guru, government guidance is still needed to help villages access knowledge and expertise about such programs.*

*At the conclusion of the talk show, primary school principal Elfrida proposed that there are no major obstacles in providing the best education for children, saying, “If we are committed, we can make it, regardless of the school, its situation or condition.”*

Program Rintisan KIAT Guru bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di daerah sangat tertinggal melalui pemberdayaan masyarakat dalam menilai layanan guru dan dikaitkannya pembayaran Tunjangan Khusus Guru dengan kehadiran guru atau kualitas layanan guru. Program ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan lima pemerintah kabupaten PDT: Manggarai Barat dan Manggarai Timur di Nusa Tenggara Timur, serta Sintang, Landak dan Ketapang di Kalimantan Barat. Program ini diimplementasikan oleh Yayasan BaKTI, dengan dukungan teknis dari World Bank dan pembiayaan dari Pemerintah Australia dan USAID.

*KIAT Guru (Teacher Performance and Accountability) Pilot aims to improve education service delivery in remote villages by empowering communities and tying payment of remote area teacher allowances with either teacher presence or teacher service quality. The pilot is a collaboration between the Ministry of Education and Culture, the National Team for the Acceleration of Poverty Reduction (TNP2K), and the governments of five districts with disadvantaged villages. Yayasan BaKTI implements the program with technical supports from the World Bank and funding from the Government of Australia and USAID.*

---

#### INFORMASI LEBIH LANJUT / FOR FURTHER INFORMATION

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang program KIAT Guru dapat menghubungi :

For further information about KIAT Guru Program, please contact :

[info@bakti.or.id](mailto:info@bakti.or.id)



# Sekber Kabupaten Bersiap Menghadapi Situasi Krisis

Oleh **SYAIFULLAH, RAHMAN RAMLAN,**  
dan **DESY MUTIALIM**



Foto : Syaifulah / Yayasan BaKTI

“Dari pelatihan ini, kita diingatkan kembali untuk memahami secara benar program BANGGA Papua ini sehingga kita menyampaikannya kepada masyarakat atau kepala distrik, benar-benar tepat sehingga tujuan program bisa dipahami.”

**Simon Kaigere** - Koordinator Wilayah Lanny Jaya - Sekber Provinsi.

“

Kenapa sa pu anak tra dapat? Sa pu anak juga anak Papua! Ini kan dana Otsus toh? Semua orang Papua berhak dapat!” Seorang pria dengan suara berat maju dengan raut wajah marah. Di belakangnya, seorang wanita juga tampak tak sabar. “Kenapa sa pu anak tra terdaftar? Sa pu anak masih di bawah empat tahun juga.”

Beberapa orang lain mulai ikut bersuara keras. Sebagian melemparkan pertanyaan, sebagian lagi membenarkan pertanyaan dan keluhan dari teman mereka. Suara-suara mereka berbaur di udara, meramaikan pagi yang sejuk di depan sebuah kantor di Tiom, ibukota Kabupaten Lanny Jaya, Papua.

Kekacauan itu mereda ketika beberapa orang dengan tenang maju dan menjawab pertanyaan warga yang mulai emosi. Ada anggota Sekber, ada kepala kampung, tokoh agama, dan tokoh perempuan. Dengan lembut mereka memandu bapak-ibu ke dalam ruangan kantor.

Ada dua meja di bagian dalam ruangan itu. Satu meja bertuliskan “Meja Keluhan untuk Perempuan”, dan satu lagi bertuliskan “Meja Keluhan untuk Laki-laki”. Seorang petugas perempuan di meja keluhan untuk perempuan dan seorang laki-laki di meja keluhan untuk laki-laki. Bapak yang tadi protes dipersilakan ke meja untuk laki-laki, sementara si ibu di meja untuk perempuan.

Dengan sabar kedua petugas tersebut menjelaskan jawaban atas keluhan mereka. Penjelasannya runut dan tampaknya bisa dipahami. Tak lama kemudian, kedua orang yang tadi protes, berdiri meninggalkan meja dan keluar dari kantor dengan wajah lebih rileks.

### Melakukan Simulasi agar Lebih Siap

Kejadian di atas bukanlah kejadian sebenarnya. Kejadian tersebut adalah simulasi untuk mengantisipasi situasi ketika Sekretariat Bersama (Sekber) Kabupaten mengumumkan nama-nama penerima manfaat BANGGA Papua. Simulasi ini menjadi bagian dari pendampingan tim BaKTI untuk Sekber Kabupaten Lanny Jaya di Tiom, Lanny Jaya, pada 24-25 Oktober lalu.

Dalam kegiatan yang diadakan di Asmat, Paniai dan Lanny Jaya ini, ditemukan beberapa kemungkinan situasi krisis. Salah satunya adalah ketika pengumuman nama penerima manfaat. Potensi krisis mungkin muncul dari warga yang telah mendaftar sebagai calon penerima manfaat namun tidak bisa menerima dana BANGGA Papua karena belum memenuhi beberapa persyaratan, semisal Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sekber mengantisipasi pertanyaan dan keluhan

**“Pelatihan ini membuat saya mampu melihat gambaran potensi krisis yang bakal terjadi di lapangan dan sekaligus cara menghadapinya.”**

**Resky Aljayanti - anggota Sekber Asmat.**

dari masyarakat tentang hal ini. Bila pertanyaan dan keluhan tidak disikapi dengan baik, akan menjadi potensi konflik yang mengganggu.

Menyadari potensi krisis ini, Sekber Kabupaten Lanny Jaya melakukan pendalaman proses identifikasi tantangan-tantangan tersebut dan mendiskusikan strategi untuk mengatasinya. Dalam kegiatan ini, Tim Sekber Kabupaten bermain peran untuk dapat memetakan lebih rinci potensi permasalahan yang dapat terjadi.

Tim Sekber Lanny Jaya mengusulkan agar pengumuman nama penerima manfaat dapat dilakukan di halaman gereja dengan pertimbangan bahwa warga relatif lebih tenang bila berada di kompleks gereja yang dianggap sebagai rumah Tuhan. Dengan demikian, pengumuman di halaman gereja bisa mereduksi potensi krisis.

Ada tiga bagian yang dianggap sebagai bagian penting dalam tahapan pelaksanaan program beberapa minggu ke depan yaitu pengumuman penerima manfaat, pencairan dana, dan penggunaan dana. Setiap anggota tim Sekber membentuk kelompok untuk mengidentifikasi potensi konflik dan mendiskusikan serta strategi menghadapinya. Tim BaKTI menjadi fasilitator saat diskusi berlangsung untuk menggali dan memperkaya temuan tim Sekber.

Dari hasil diskusi kelompok dilakukanlah simulasi dari dua situasi yang dianggap paling krusial untuk Lanny Jaya. Salah satunya adalah situasi saat warga mengajukan keluhan atau protes terhadap hasil pengumuman penerima manfaat.

Skenario simulasi pun disusun. Satu kelompok berperan sebagai tim penerima keluhan dan satu kelompok lainnya berperan sebagai warga yang mengajukan keluhan. Kelompok pertama mendiskusikan tentang jenis-jenis keluhan warga yang mungkin muncul dan bagaimana mengatasinya, lengkap dengan standar operasi penanganan keluhannya. Sementara kelompok

kedua membagi peran di antara anggotanya, lengkap dengan daftar pertanyaan paling kritis yang mungkin dilontarkan oleh warga.

Setelah semua siap, simulasi pun digelar. Semua peserta membawakan perannya dengan sangat baik. “Kami bersyukur sekali dengan adanya pelatihan karena jadi tahu kemungkinan yang bisa terjadi dan bagaimana menghadapinya,” kata Roberth Kamo, Ketua Sekber Lanny Jaya.

Roberth menekankan pentingnya setiap anggota Sekber untuk benar-benar memahami prinsip program BANGGA Papua yang bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi anak Papua, dikhususkan bagi anak orang asli Papua di bawah usia 4 tahun, dan penerima manfaat dipersyaratkan untuk memiliki dokumen kependudukan khususnya NIK.

Otaingen Wanimbo, seorang Kepala Kampung di Kabupaten Lanny Jaya yang mengikuti pendalaman ini menyampaikan apresiasinya atas kegiatan ini. “Selama ini pemerintah kampung hanya dilibatkan saat melakukan pendataan, tapi tidak diberi bekal untuk menghadapi kondisi yang tak diinginkan,” ungkapnya. “Pelatihan ini membuat saya mampu melihat gambaran potensi krisis yang bakal terjadi di lapangan dan sekaligus cara menghadapinya.” Resky Aljayanti – anggota Sekber Asmat. Kepala Kampung memegang peranan penting dalam seluruh tahapan di Program BANGGA Papua. Merekalah yang paling tahu siapa saja warganya yang berhak menerima manfaat program.

Pada saat pengumuman penerima manfaat, mereka juga yang akan berada di garis depan untuk menerima keluhan warganya. Kepala Kampung juga diharapkan dapat ikut memonitoring penggunaan dana agar tepat sasaran.

### **Pelatihan Komunikasi Tingkat Lanjut di Timika**

Pelatihan Komunikasi Tingkat Lanjut diadakan di Timika pada 14-15 Oktober lalu dan diikuti oleh anggota Sekber Asmat, Paniai, dan Lanny Jaya untuk mengikuti pelatihan ini. Pelatihan komunikasi tingkat lanjut ini memantapkan Pelatihan Komunikasi Persuasif yang telah dilaksanakan pada Maret dan April.

Fokus pelatihan ini adalah mempersiapkan Sekber kabupaten dalam menghadapi tantangan yang mungkin muncul menjelang pencairan dana. Salah satu materi pelatihan termasuk keterampilan teknis tentang bagaimana menjawab pertanyaan dan merespon keluhan dari masyarakat saat nama-nama penerima manfaat diumumkan dan pencairan dana dilakukan.



Foto : Syaifullah / Yayasan BaKTI

Pelatihan di Timika juga menggunakan pendekatan simulasi. Simulasi pertama berfokus pada pengumuman nama penerima manfaat yang dilakukan Sekber dan perangkat kampung. Hasil simulasi berhasil merumuskan beberapa strategi penanganan keluhan, salah satunya adalah dengan melokalisir warga yang mengeluh.

Ide melokalisir ini bertujuan agar warga yang melakukan protes tidak memprovokasi warga lainnya. Selain itu agar keluhannya bisa segera ditangani dengan pendekatan yang lebih personal. Pendekatan ini diharapkan bisa meredakan emosi sehingga lebih mudah menerima penjelasan. “Dari pelatihan ini, kita diingatkan kembali untuk memahami secara benar program BANGGA Papua ini sehingga kita menyampaikannya kepada masyarakat atau kepala distrik, benar-benar tepat sehingga tujuan program bisa dipahami.” Simon Kaigere – Koordinator Wilayah Lanny Jaya – Sekber Provinsi. Dari simulasi pertama dipelajari pentingnya ketersediaan data mentah sebagai bukti yang mendasari penjelasan petugas dalam menjawab keluhan atau protes. Pembelajaran lainnya adalah pentingnya melibatkan tokoh agama, tokoh adat atau kepala suku, serta tokoh perempuan untuk mendukung perangkat

kampung dan Sekber kabupaten saat mengumumkan nama-nama penerima manfaat dan melakukan pencairan dana. Mereka adalah pihak-pihak yang dipercaya dan didengarkan oleh masyarakat dan karenanya dapat ikut memenangkan masyarakat.

Simulasi kedua mengangkat peran penting Sekber kabupaten dalam melakukan sosialisasi program kepada kepala distrik. Peserta pelatihan berlatih menyampaikan prinsip dasar BANGGA Papua, visi pemerintah provinsi dan manfaat nyata program bagi masyarakat. Adalah penting bagi pelaksana sosialisasi program untuk benar-benar memahami prinsip dasar program BANGGA Papua, visi Pemerintah Provinsi Papua yang sedang membangun Generasi Emas Papua, dan manfaat nyata program untuk masyarakat.

#### INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang program BANGGA Papua dapat menghubungi [info@bakti.or.id](mailto:info@bakti.or.id)



# Ambulans untuk Warga Desa

Oleh **BAIQ TITIS YULIANTY**

**Mengapa harus ambulans? Untuk siapa?**  
Pertanyaan ini tentu dapat muncul di benak siapa saja.  
Namun bagi Yahya, pembelian ambulans ini  
sangat penting.

Mobil ambulans milik warga Desa Kembang Kerang yang pembelian dan biaya operasionalnya diambil dari Dana Desa akan digunakan sebagai sarana transportasi untuk rujukan ke RSUD dan RSUD atau ketika terjadi tindak kekerasan dan kontrol rutin setelah perawatan. Pengadaan ambulans ini adalah wujud keberhasilan Pak Yahya sebagai Kepala Dusun dan ketua kelompok konstituen Mele Maju dalam memanfaatkan Dana Desa guna membantu warga mengakses program perlindungan sosial pemerintah. Foto: **Triyati / Yayasan BaKTI**



**T**ahun 2015 menjadi titik awal bagi Yahya untuk dapat memahaminya berbagai kasus terkait dengan perempuan. Saat itu, Yahya mendapatkan kesempatan untuk bergabung dalam kelompok dampingan Program Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan atau dikenal dengan nama Program MAMPU. Dalam proses pembentukan kelompok yang selanjutnya disebut Kelompok Konstituen Mele Maju, Yahya dipercaya menjadi ketua bagi para anggota yang sebagian besar adalah perempuan. Namun demikian, sebagai seorang Kepala

Dusun di Kembang Kerang Lauk Daya, ia tidak merasa kesulitan menjalankan tugas tersebut. Justru dengan terlibat dalam berbagai kegiatan yang difasilitasi oleh Yayasan BaKTI bagi Kelompok Konstituen Mele Maju, ia berkesempatan mempelajari dan memahami berbagai permasalahan yang dihadapi kaum perempuan dan anak di lingkungan yang dipimpinnya.

Memfasilitasi Kelompok Konstituen dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan pembangunan adalah salah satu fokus tematik Program MAMPU yaitu membuka akses perempuan miskin kepada program perlindungan sosial pemerintah, membuka akses perempuan kepada pekerjaan dan menghapuskan diskriminasi di tempat kerja, meningkatkan kondisi tenaga kerja perempuan ke luar negeri, meningkatkan kepemimpinan perempuan untuk kesehatan reproduksi yang lebih baik,

meningkatkan kepemimpinan perempuan untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan. Sehubungan dengan itu, hal yang paling sering dihadapi oleh Yahya dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Dusun dan Ketua Kelompok Konstituen adalah keterbatasan bagi perempuan dalam mengakses program perlindungan sosial pemerintah.

Banyak warga di kampungnya yang belum terjangkau beragam program perlindungan sosial dari pemerintah. Bahkan banyak pula di antara mereka yang belum mengetahui tentang apa itu perlindungan sosial. Pada praktiknya, Yahya telah mengeluarkan cukup banyak biaya dalam membantu warga untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Suatu ketika, ia harus menggadaikan sepeda motornya untuk memenuhi kebutuhan biaya melahirkan salah satu warga di kampungnya. Dari pengalaman itu, Yahya gigih membantu warga tidak mampu dalam memenuhi segala persyaratan demi mendapatkan layanan kesehatan gratis dari Pemerintah.

Usaha yang dilakukan oleh Yahya tidak berhenti sampai di situ. Berbagai pertimbangan untuk meningkatkan kesejahteraan kaum perempuan melalui ragam kegiatan pembangunan selalu disampaikannya dalam setiap rapat pembangunan di desa. Ia selalu mendorong Dana Desa untuk program-program pemberdayaan perempuan selain untuk pembangunan sarana kesehatan agar lebih mudah diakses warga.

Sayang sekali usahanya tidak serta merta membuahkan hasil. Tidak patah arang, Yahya tetap memprioritaskan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap pengajuan agenda pembangunan dusun.

Selain keterbatasan akses terhadap program perlindungan sosial, partisipasi perempuan dalam pembangunan dinilainya masih sangat rendah. Hal ini terlihat dalam setiap rapat atau musyawarah di desa. Perempuan tidak pernah mendapatkan undangan menghadiri rapat atau



(Foto : Triyati / Yayasan BaKTI)

musyawarah desa. Inilah yang disebutkan Yahya sebagai pembatasan kesempatan bagi perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan tentang pembangunan desa, bahkan dalam hal-hal yang terkait langsung dengan kepentingan perempuan. Kondisi ini semakin menjadikan perempuan terpinggirkan.

Pada tahun 2017 diselenggarakan pesta demokrasi 6 tahunan. Ini menjadi kesempatan baik untuk memperjuangkan hak perempuan. Perwakilan perempuan dari beberapa dusun datang menemui Yahya dan memintanya untuk maju dalam Pemilihan Kepala Desa (Kades). Awalnya ia ragu, tapi melihat kembali berbagai perjuangan yang telah dilakukan serta dorongan dari kaum perempuan maka ia pun memantapkan diri untuk ikut berlaga dalam pemilihan tersebut.

Selama proses kampanye Yahya merasa sangat terharu karena kebutuhan konsumsi tim sukses seluruhnya bersal dari pemberian kaum perempuan yang mendukungnya. Mereka dengan sukarela mengantarkan beras, gula, kopi, sayur-

sayuran, singkong, ubi dan berbagai hasil pertanian lainnya ke rumah Yahya. Ketika hari pemilihan tiba, sungguh hasil yang luar biasa, Yahya dapat mengungguli petahana.

Januari 2018 menjadi awal bagi Yahya untuk mengemban tugas sebagai Kepala Desa. Ia mengaku saat itu masih banyak perubahan yang perlu dilakukan dalam sistem pemerintahan agar cita-cita untuk mensejahterakan perempuan dapat terwujud. Hal yang pertama dilakukan oleh Pak Yahya adalah memberikan kesempatan bagi perempuan untuk terlibat dalam rapat-rapat strategis di desa, seperti musyawarah pembangunan serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.

Usulan-usulan terkait kebutuhan pemberdayaan perempuan juga menjadi salah satu prioritas penganggaran desa di bawah kepemimpinan Yahya. Dalam sembilan bulan, sebuah ambulans telah tersedia di desa. Ini adalah salah satu yang telah lama sekali diperjuangkan Yahya.



(Foto : Triyati / Yayasan BaKTI)

**(Kiri)** Pak yahya (pakai topi) yang saat itu masih menjadi Ketua Kelompok Konstituen (KK) sedang mendampingi pasien tidak mampu melakukan rujukan ke RSUD.

**(Kanan)** Warga dusun yang tergabung dalam Kelompok Konstituen Mele Maju sedang melakukan proses penyusunan Peraturan Desa (Perdes) dimana salah satunya membahas pengadaan mobil ambulans untuk warga Desa Kembang Kerang.

**Apa yang dilakukan oleh Pak Yahya dan warga Desa Kembang Kerang yang memanfaatkan Dana Desa untuk kebutuhan mendesak dan strategis bagi masyarakat desa, patut diacungi jempol dan dapat ditiru oleh pemerintah desa yang lain.**

#### **Ambulans di Desa**

Mengapa harus ambulans? Untuk siapa? Pertanyaan ini tentu dapat muncul di benak siapa saja. Namun bagi Yahya, pembelian ambulans ini sangat penting. Dari pengalamannya selama menjadi ketua kelompok konstituen dan kepala dusun, masalah utama yang dihadapinya adalah transportasi untuk membawa pasien atau korban

kekerasan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas terdekat. Apalagi jika pasien atau korban ternyata harus dirujuk ke Rumah Sakit Daerah. Tentu saja biaya transportasi akan semakin tinggi. Jika menggunakan mobil ambulans dari Puskesmas Kecamatan menuju rumah sakit di ibukota kabupaten, warga biasanya dikenakan biaya sebesar 200 ribu rupiah. Jika pasien dirujuk ke Rumah Sakit Provinsi biaya penggunaan ambulans dapat mencapai 500 ribu rupiah. Jika warga memilih menggunakan mobil sewaan, tentu saja harganya jauh lebih tinggi.

Pada awalnya ambulans tersebut akan ditujukan untuk perempuan baik untuk rujukan bersalin atau ketika terjadi tindak kekerasan. Namun tidak terbatas pada hal tersebut. Dapat untuk rujukan ke RSUD dan RSUP atau untuk melakukan kontrol rutin setelah perawatan. Karena ambulans itu menjadi hak seluruh warga Desa Kembang Kerang. Karena pembelian dan biaya operasionalnya dibebankan pada Dana Desa dengan alokasi untuk pengadaan sarana dan prasarana kesehatan. Sementara untuk operasional dan gaji sopir bersumber dari Dana

## KONSULTASI PUBLIK

# “ RANPERDES PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK ” DI DESA KEMBANG KERANG LOMBOK TIMUR

TIMUR, 09 MEI 2018



Pak Yahya (kiri) melakukan proses penandatanganan/pengelesaian Ranperdes dalam kegiatan Konsultasi Publik, Ranperdes Perlindungan Perempuan dan Anak di Desa Kembang Kerang Lombok Timur.

Foto: **Triyati / Yayasan BaKTI**

Desa sebesar 70% dan sisanya berasal dari pendapatan Asli Desa (PADes) khususnya dari tanah pecahu.

Tentu saja ambulans desa ini disambut gembira seluruh warga karena mengurangi beban biaya saat dirawat di rumah sakit. Mereka sangat terbantu dengan adanya petugas ambulans yang tidak hanya diharuskan mampu mengendarai mobil tersebut tetapi juga dituntut untuk dapat membantu warga mengurus administrasi baik di RSUD ataupun di RSUP hingga tuntas. Hal yang semakin membahagiakan bagi warga adalah

semua pelayanan itu didapatkan tanpa biaya alias gratis.

Apa yang dilakukan oleh Pak Yahya dan warga Desa Kembang Kerang yang memanfaatkan Dana Desa untuk kebutuhan mendesak dan strategis bagi masyarakat desa, patut diacungi jempol dan dapat ditiru oleh Pemerintah Desa yang lain. Catatan lain yang dapat digarisbawahi adalah, Pak Yahya adalah pemimpin desa yang didorong dan didukung oleh perempuan, dan karena itu bekerja untuk pemenuhan hak-hak perempuan.

### INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang program MAMPU BaKTI hubungi : [info@bakti.or.id](mailto:info@bakti.or.id)

# Leboni

## Elegi Pembangunan di Jantung Sulawesi

Oleh **M. YUSUF WEANDARA**

Luwu Utara adalah kabupaten di Sulawesi Selatan yang berbatasan langsung dengan Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah. Di kabupaten ini terdapat dua kecamatan yang lokasinya tepat berada di tengah-tengah Pulau Sulawesi sehingga dijuluki sebagai jantung Sulawesi. Seko dan Rampi adalah dua kecamatan tersebut. Berada di tengah-tengah Pulau Sulawesi membuat dua kecamatan ini sangat sulit untuk diakses terlebih melalui jalur darat. Lebatnya hutan Sulawesi, terjalnya pegunungan yang berhias tebing dan jurang, jalanan yang berlumpur adalah beberapa tantangan yang harus di taklukkan.

Foto: M. Yusuf Weandara



**K**ecamatan Rampi berbatasan dengan Sulawesi Tengah di sebelah Utara, Kecamatan Masamba di sebelah selatan, Kecamatan Seko di sebelah Barat, dan Mangkutana-Luwu

Timur di sebelah Timur. Terdapat enam desa dalam wilayah Kecamatan Rampi, yaitu Desa Onondowa sebagai Ibu Kota Kecamatan, Desa Sulaku, Desa Leboni, Desa Tedeboe, Desa Dodolo dan Desa Rampi. Selain jalur darat, untuk menuju ke kecamatan ini juga bisa melalui jalur udara. Penerbangan dari Bandara Andi Jemma Masamba ke Rampi dibuka dari hari Senin hingga Sabtu dengan waktu terbang sekitar 15 menit.

#### **Membelah Hutan Menuju Leboni**

Beberapa tukang nampak sigap menyusun barang muatan sesuai pesanan orang-orang di Rampi. Semen 2 sak yang sudah dibungkus karung tersusun rapi di bagian depan motor.

Jerigen 35 liter berisi bensin diletakkan di bagian belakang. Di atas jerigen tersebut masih ada kotak kardus yang telah dibungkus rapi dan di atas kardus masih disisipkan lagi jerigen berisi bensin atau pertalite 5 liter sebagai bahan bakar cadangan dan botol berisi oli bekas untuk melumasi rantai motor dalam perjalanan nantinya.

Bagian luar dari batok motor juga tak luput dari gantungan berbagai barang yang menempel dengan rapi. Semua barang diikat dengan tali yang terbuat dari karet ban dalam. Orang-orang di sana biasa menyebut nya “gata”.

Kelengkapan onderdil sepeda motor dan kemampuan memperbaiki kendaraan adalah keterampilan yang wajib dimiliki tukang ojek di kecamatan ini. Jenis kendaraan motor yang digunakan bukan motor *trail* yang khusus dirancang menghadapi medan ekstrim, melainkan motor-motor 4 yang sudah jarang terlihat di kota besar.



Foto : M. Yusuf Weandara



Foto : M. Yusuf Weandara



Foto : M. Yusuf Weandara

Rombongan kami berjumlah 8 motor dan berangkat melewati hutan dan sungai. Suara motor menggema memecah kesunyian hutan. Setelah 2 jam perjalanan, kami tiba di Desa Pincara Dusun Salulebba. Dusun terakhir sebelum memasuki hutan belantara dan tantangan yang sesungguhnya.

Lebatnya hutan di jantung Sulawesi menyambut kedatangan kami. Pohon-pohon besar berdiri menjulang ke langit, tanaman merambat menutupi setiap pohon membuatnya saling menyatu. Kondisi ini menyulitkan cahaya menembus ke dalam, tak heran jika batang-batang pohon besar ini berbalut lumut yang tebal.

Tanah yang dilalui didominasi pasir dan batuan gunung. Bila hujan turun, tanah yang dilalui akan berubah menjadi lumpur sedalam lutut orang dewasa. Tidak jarang kami harus meniti tanjakan dengan tikungan yang menyerupai huruf S. Di setiap tikungan kami

harus ekstra hati-hati karena lengah sedikit saja risikonya adalah jatuh ke jurang yang dalam. Dibutuhkan 7 jam perjalanan untuk sampai di *base camp* kedua. Kami harus bermalam di hutan untuk menghimpun kembali tenaga sebelum melanjutkan perjalanan esok hari.

Keesokan harinya, kami melanjutkan perjalanan setelah mengisi perut dengan makanan seadanya. Medan yang ditempuh hari ini tiga kali lebih sulit dari yang kemarin. Jika kemarin jalan yang dilalui masih agak lebar kali ini benar-benar jalan setapak yang lebarnya kurang dari 1 meter. Di satu sisi ada rumput, batang pohon dan akar kayu dan di sisi lain ada jurang dengan dasar yang samar-samar terlihat.

Setelah 3 jam perjalanan tibalah kami di 'terowongan'. Ini bukan terowongan yang sebenarnya melainkan parit dengan kedalaman 8 hingga 10 meter. Jalur ini hanya bisa dilalui oleh satu motor saja. Parit yang sempit ini juga memiliki turunan dan tanjakan yang curam.



Foto: M. Yusuf Weandara

Tidak jarang lutut dan betis kami berbenturan dengan batu dan akar kayu. Tak ada waktu untuk meringis kesakitan, sebab jika lengah sedikit saja, batu-batu yang lain masih mengantri untuk mencium betis anda.

### Leboni, Desa di Jantung Sulawesi

Keindahan alam yang nampak dari ketinggian menyambut kami begitu memasuki Desa Leboni. Desa yang di kepalai oleh Ibu Jumiaty Parman ini terdiri dari 2 dusun yaitu Dusun Beloi dan Dusun Welande. Masyarakat di sini kebanyakan bersuku Pamona.

Sungai dengan air yang jernih berpadu dengan irama gemericik air dari sela-sela bebatuan yang menonjol sungguh menggoda hati untuk berendam dan merilekskan otot-otot tubuh yang lelah selama perjalanan. Padang ilalang yang menguning terbelah oleh jalan setapak nampak seperti di negeri sebuah dongeng. Nampak pula hamparan sawah di punggung bukit dan beberapa kerbau yang gemuk.

Kondisi Leboni tidak jauh berbeda dengan desa-desa lain di Kecamatan Rampi. Infrastruktur masih menjadi kendala utama selain harga barang yang melambung tinggi. Di desa ini sudah ada gedung sekolah dasar, Puskesmas Pembantu, Kantor Desa, lapangan serbaguna dan rumah ibadah.

Desa ini sudah memiliki pembangkit listrik sendiri yang bertenaga air dan digunakan pada malam hari saja. Iuran listrik untuk satu rumah per bulan berkisar 15 ribu hingga 30 ribu rupiah. Mesin ini sudah berkali-kali rusak saat ini tidak lagi bekerja optimal sebab beberapa suku cadang yang rusak belum diganti.

Masyarakat Desa Leboni mayoritas adalah petani dengan kopi dan kakao sebagai hasil kebun utama. Hasilnya dijual ke Kota Masamba. Leboni salah satu penghasil beras terbaik di

Kecamatan Rampi. Beras di sini rasanya enak karena para petaninya sama sekali tidak menggunakan pupuk dan pestisida kimiawi.

Minimnya infrastruktur adalah alasan utama Leboni dan desa-desa lain di kecamatan ini menjadi tertinggal. Benar ada pesawat kargo yang mengangkut barang-barang kebutuhan dasar namun barang-barang lainnya termasuk bahan bakar

masih didistribusikan melalui jalur darat menggunakan ojek.

Para tukang ojek di Rampi mematok harga 7.500 rupiah per kilo untuk mengangkut semen, sedangkan untuk biaya angkut bahan bakar 5.000 rupiah. Biaya perjalanan dengan menumpang ojek dari Leboni ke ibukota kecamatan adalah 600 ribu per orang. Nilai ini masing-masing terhitung kecil jika dibandingkan dengan risiko nyawa yang dipertaruhkan di sepanjang perjalanan.

Tukang ojek di Leboni kebanyakan adalah remaja berusia 16-18 tahun. Umumnya mereka sekolah sambil bekerja. Tidak sedikit juga yang putus sekolah dengan alasan guru sekolah pun jarang datang ke sekolah.

Sejatinya pemuda-pemuda di kecamatan ini juga mendambakan pendidikan seperti halnya di kota karena mereka juga bercita-cita memiliki hidup yang lebih baik. Namun kenyataannya mereka mempertaruhkan nyawa menjadi supir ojek di usia belia demi membantu keluarga memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Desa Leboni tentu saja bukanlah satu-satunya daerah terpencil yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Akses jalan jelas menjadi kebutuhan utama untuk dapat menunjang pembangunan di sana. Mewujudkan sila ke 5 Pancasila adalah tanggung jawab kita bersama. Oleh sebab itu sudah sepatutnya semua elemen masyarakat dan pemerintah harus selalu bekerja sama saling bahu-membahu dalam menjalankan roda pembangunan.

### INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi penulis [weandaraadar@gmail.com](mailto:weandaraadar@gmail.com)

## Artikel

### **SAID Berperan dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Papua dan Papua Barat**

Sentani (KPN) Hilda Eveline, KOMPAK Provincial Manager Provinsi Papua-Papua Barat, menyampaikan SAID dapat berperan dalam meningkatkan pelayanan publik di Papua, sehingga semakin tanggap terhadap kebutuhan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan pada Rapat Koordinasi Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia (FORDASI) pada 21-23 November 2018 yang berlangsung di Gedung Olahraga Cenderawasih APO.

"Kami sangat menghargai kolaborasi yang baik antara Pemerintah Papua, Program KOMPAK, dan segenap masyarakat yang terlibat,"kata Hilda Eveline.

SAID dilaksanakan melalui program KOMPAK-LANDASAN yang didukung oleh Pemerintah Australia untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan identitas hukum yang berkualitas di Provinsi Papua dan Papua Barat. Program KOMPAK-LANDASAN dilaksanakan di 205 kampung, 181 Sekolah Dasar, 29 Puskesmas, di 24 Distrik yang tersebar di 10 Kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Info selengkapnya di : [www.batukarinfo.com/news/said-berperan-dalam-meningkatkan-pelayanan-publik-di-papua-dan-papua-barat](http://www.batukarinfo.com/news/said-berperan-dalam-meningkatkan-pelayanan-publik-di-papua-dan-papua-barat)



### **Terima Strategi Kebudayaan Nasional, Presiden: Kebudayaan adalah Kegembiraan**

Pemerintah bersama dengan berbagai pemangku kepentingan bidang kebudayaan telah berhasil menyusun strategi kebudayaan nasional. Dokumen rumusan Strategi Kebudayaan Nasional telah diterima oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, pada Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) Tahun 2018.

Dalam sambutannya, Presiden mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegiat kebudayaan yang telah bekerja keras dalam upaya pemajuan kebudayaan. Disampaikannya bahwa inti dari kebudayaan adalah kegembiraan.

Presiden meyakini bahwa bangsa Indonesia memiliki kekhasan sendiri dibanding bangsa-bangsa lain. Menurutnya, kebudayaan dan ilmu pengetahuan serta peradaban bangsa Indonesia lahir dari pengalaman panjang melalui perkembangan zaman. Namun, menjaga budaya untuk terus tumbuh di tengah interaksi belantara budaya-budaya dunia menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia.

Info selengkapnya di : [www.batukarinfo.com/news/terima-strategi-kebudayaan-nasional-presiden-kebudayaan-adalah-kegembiraan](http://www.batukarinfo.com/news/terima-strategi-kebudayaan-nasional-presiden-kebudayaan-adalah-kegembiraan)



### **Creating Blue Carbon Opportunities in The Maritime Archipelago Indonesia**

Blue carbon is the carbon stored in coastal, tidal, wetland and marine ecosystems, including carbon-rich mangroves, salt marshes and seagrass meadows. Indonesia is the world's richest in coastal blue carbon ecosystems - housing around 3 million hectares of mangroves and 0.3 million hectares of seagrass meadows.

Strategies and measures to conserve and restore these habitats may be supported by the blue economy and encompass wider economic sectors including fishing, tourism, off-shore mining, transportation and shipping industries.

Info selengkapnya di : [www.batukarinfo.com/referensi/creating-blue-carbon-opportunities-maritime-archipelago-indonesia](http://www.batukarinfo.com/referensi/creating-blue-carbon-opportunities-maritime-archipelago-indonesia)



## Panduan Reses Partisipatif

**PENULIS** Lusya Palulungan, Yudha Yunus, M. Ghufuran H. Kordi, M. Taufan Hidayat, Puspita Ratna Yanti

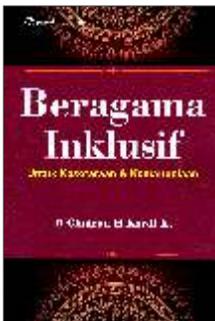
Bagi anggota DPR/DPRD, reses atau masa reses adalah salah satu kegiatan strategis dan penting karena dengan reses, anggota DPR/DPRD dapat mengunjungi konstituen di daerah pemilihannya. Ada beberapa hal yang hendak diperoleh oleh wakil rakyat dalam kunjungan reses, salah satunya menjangkau aspirasi konstituen. Namun pada banyak kasus, berbagai aspirasi tidak selalu diakomodasi dalam perencanaan pembangunan atau pembuatan kebijakan. Untuk itulah Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) bersama Yayasan BaKTI dan mitranya mengembangkan Reses Partisipatif yang dikemas dalam buku panduan.



## Pentingnya Pengetahuan Lokal! Kekuasaan, Konteks dan Pembuatan Kebijakan di Indonesia

**PENULIS** Kharisma Nugroho, Fred Carden dan Hans Antlov

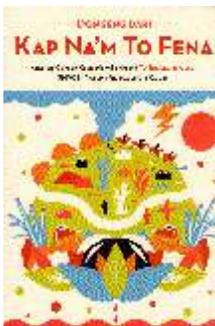
Buku ini membawa Anda menjelajahi peran penting dari pengetahuan lokal dalam proses penyusunan kebijakan publik dan juga bagaimana pengetahuan lokal bersama dengan pengetahuan ilmiah dan pengetahuan kaum profesional menghasilkan pengetahuan yang relevan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan. Sepuluh studi kasus yang beragam dari berbagai wilayah di Indonesia digunakan sebagai rujukan dalam analisis di buku ini.



## Beragama Inklusif untuk Kesetaraan dan Kemanusiaan

**PENULIS** M. Ghufuran H. Kordi K.

Agama di era sekarang membuka lembaran harapan karena berbagai survei membuktikan adanya optimisme umat manusia yang menaruh harapan padanya. Tetapi di balik itu, terpampang pula kekecewaan karena sikap sebagian penganut agama yang eksklusif; membenarkan diri-sendiri dan kelompoknya, membabi buta terhadap kelompok yang berbeda paham, apalagi berbeda agama. Oleh karena itu, butuh kerja keras dan cepat untuk menafsirkan dan menjalankan ajaran agama yang lebih membumi, tidak eksklusif, dan anti kekerasan. Hal ini sangat penting agar agama berwajah inklusif dan tetap eksis.



## Dongeng dari Kap Na'm To Fena

**PENULIS** Pelajar SMPK St. Yoseph Freinademetz Kapan

Dongeng dari Kap Na'm To Fena adalah kumpulan cerita pendek karya 15 pelajar yang tergabung dalam To The Lighthouse, sebuah kelas menulis kreatif yang digagas SMPK St. Yoseph Freinademetz Kapan bersama Dicky Senda dan Komunitas Lakoat.Kujawas sejak Agustus 2017. Setiap Sabtu pagi mereka berkumpul, belajar menulis cerpen dan puisi, membaca berbagai teks, nonton film, berdiskusi, bermain teater sambil menuliskan kembali berbagai dongeng dan tradisi lisan yang berkembang di Mollo, Nusa Tenggara Timur.